



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan, Perdagangan, Kabupaten Sambas Tahun 2025– 2029 ini dapat diselesaikan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan rumah tangga Kabupaten Sambas pada sektor Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas serta merumuskan, sinkronisasi rencana program pembangunan atas keterpaduan kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dengan pemerintah Propinsi dan pusat yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Rencana Strategis PD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sambas, agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan efektif maka program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut.

Program dan sasaran kerja secara umum diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029. Sedangkan rencana kerja secara tahunan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dijabarkan lebih rinci dan lebih operasional dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Performance Plan) disingkat Renja yang disusun setiap tahun.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Diharapkan dokumen Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja.

Sambas, Agustus 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS

dr. I KETUT SUKARJA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651010 199509 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4. Kelompok sasaran layanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	40
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	40
2.2.2 Isu Strategis	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	49
3.3 Startegis Perangkat Daerah dalam menjapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1 Uraian Program	56
4.2 Uraian Kegiatan	61

4.3	Uraiana Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	61
4.4	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	156
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	158
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	159
BAB V	PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	16
Tabel 2.2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan	16
Tabel 2.3	Komposisi Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.6	Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.7	Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana (Aset dan Modal) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	20
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	22
Tabel 2.10	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.11	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2025	23
Tabel 2.12	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Perkecamatan Tahun 2024	25
Tabel 2.13	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 2.14	Jumlah UKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sambas Tahun 2024	27
Tabel 2.15	Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Mikro Perkecamatan	27
Tabel 2.16	Jumlah Industri Tahun 2020 – 2024	28
Tabel 2.18	Pertumbuhan Industri Tahun 2020 – 2024	28
Tabel 2.19	Rekapitulasi Data Industri Kabupaten Sambas Tahun 2024	30
Tabel 2.20	Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	31
Tabel 2.21	Profil Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2020	32

Tabel 2.22	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	35
Tabel 2.23	Data Ekspor Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024	36
Tabel 2.24	Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas	36
Tabel 2.25	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	51
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	54
Tabel 4.1	Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	58
Tabel 4.2	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	71
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	101
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	158
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berdasarkan Perbup No 14 Tahun 2020)	8
Gambar 2.2	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2020 – 2024	23
Gambar 2.3	Persentase Koperasi Aktif	24
Gambar 2.4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	26
Gambar 2.5	Jumlah Industri Tahun 2020 – 2024	28
Gambar 2.6	Pertumbuhan Industri Tahun 2020 – 2024	29
Gambar 2.7	Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	31
Gambar 2.8	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	35
Gambar 2.9	Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas	36
Gambar 2.10	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	39
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	49
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing – masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencanan Pembangunann menurut UU tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk pembangunan daerah dalam dua puluh lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk pembangunan daerah dalam lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan.

UU No 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samba. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencanan Strategis (RENSTRA) PD menjadi mutlak, sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya selama periode tahun 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembangunan Industri Kabupaten Sambas Tahun 2018 – 2038;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, Pembangunan dan Perlindungan Usaha Mikro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 83);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 576/DISKUMINDAG/2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 576).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sambas di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
- b. Untuk menentukan sasaran, arahan, kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan masyarakat Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 adalah:

- a) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b) Menjamin tercapainya penganggaran sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c) Menjamin terciptanya pelaku usaha koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang mandiri, berdaya saing menuju kesejahteraan masyarakat Sambas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.3 Startegis Perangkat Daerah dalam menjapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraiana Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

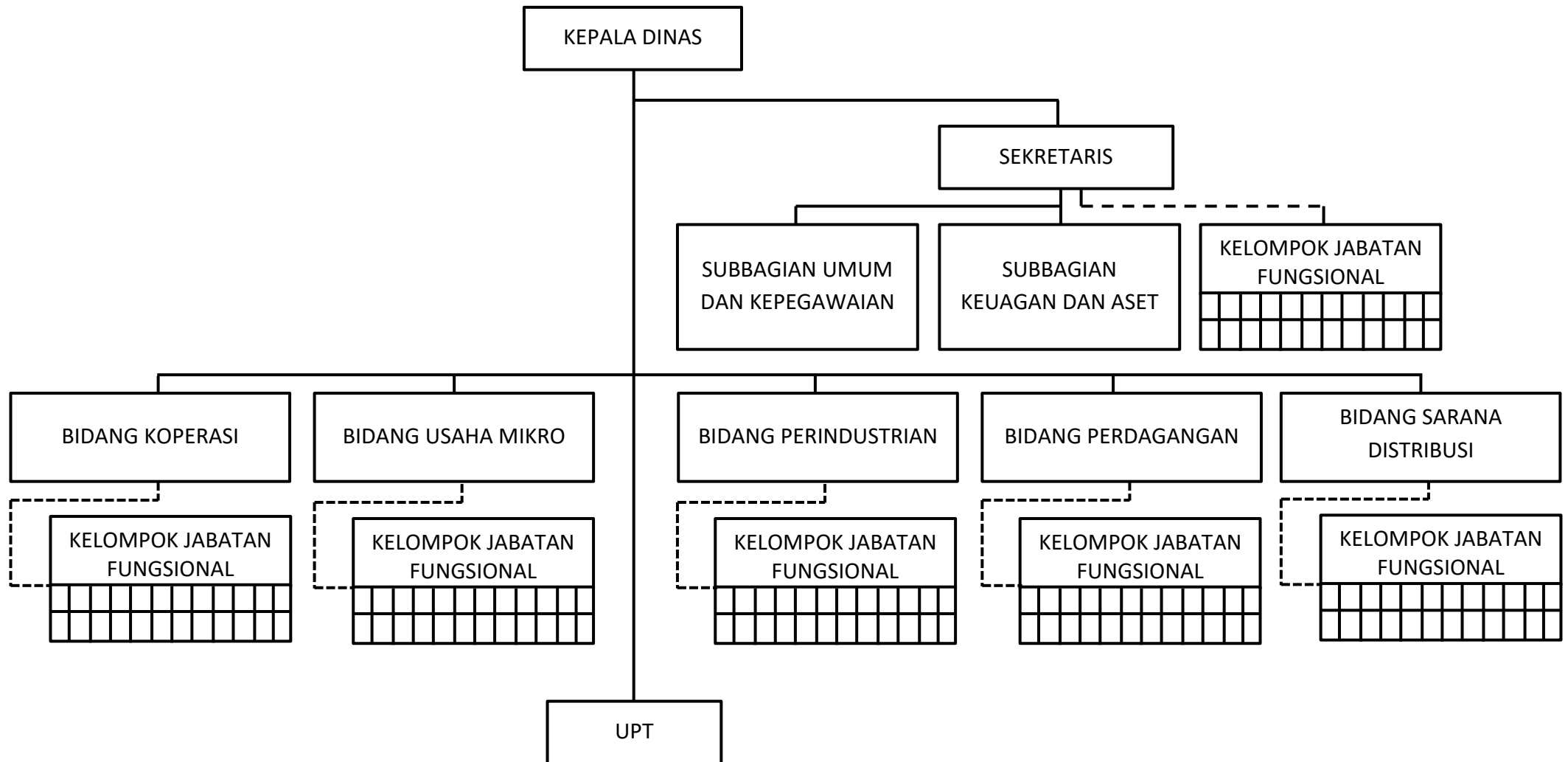
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha , Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dengan peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 adalah:

GAMBAR 2.1
BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS
(BERDASARKAN PERBUP NO 83 TAHUN 2021)



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro perindustrian, dan perdagangan; pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di lingkungan dinas;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan program di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang kelembagaan, perizinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang koperasi;
- b. penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koperasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kewirausahaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang usaha mikro;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha mikro;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro, ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang usaha mikro;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang usaha mikro; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi perdagangan, dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang sarana distribusi perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana distribusi perdagangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang sarana distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
- e. pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Revitalisasi dan Rehabilitasi sarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penataan penertiban tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan asongan;
- g. pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana perdagangan kepada pedagang kaki lima dan asongan serta pedagang pasar;

- h. penyiapan dokumen kelengkapan sarana perdagangan (IMB, Sertifikasi dokumen lingkungan, proses hibah dan lain-lain);
- i. pelaksanaan penyediaan/penyiapan lahan untuk pembangunan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- j. penyiapan, Pelaksanaan dan pembinaan pasar rakyat ber-SNI (standar nasional indonesia);
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi perdagangan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor;

- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang agro dan hasil hutan, logam, mesin, dan elektronika, serta kerajinan, kimia, dan aneka industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perindustrian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- e. pengkoordinasian kegiatan di perindustrian;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk kelengkapan dokumen pengurusan pembuatan Izin Usaha Industri Kecil (IUIK), Izin Usaha Industri Menengah (IUIM), Izin Usaha Industri Besar (IUIB), dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
- j. pembinaan dan pemantauan mutu pelaksanaan pembangunan industri;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perindustrian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021, tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Koperasi membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Usaha Mikro membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Kabid Perindustrian membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kabid Perdagangan Membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Kepala UPTD Metrologi Legal

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kumindag didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, PPPK sebanyak 1 (satu) orang dan honorer sebanyak 19 (sembilan belas) orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	
Kepala Bidang	4	-	-	-	3	1	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-	-	
Fungsional	-	5	-	-	-	5	-	-	
Pelaksana	1	14	4	-	1	13	1	4	
Kepala UPTD Metrologi Legal	1	-	-	-	1	-	-	-	
Jumlah	8	21	4	-	6	22	1	4	

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2025

Tabel 2.2

**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	dr. I KETUT SUKARJA NIP. 19651010 199509 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	S.1
2	URAI RIZA FAHMI, S.Pd, M.Pd NIP. 19650706 199703 2 005	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	S.2
3	Vivin Elviana, SP.MP NIP. 19780317 200212 2 006	Pembina (IV/a)	Kabid Perindustrian	S.2
4	Syahrul Aman, SE NIP. 19721027 200312 1 005	Pembina (IV/a)	Kabid Koperasi	S.1
5	Eka Musrini, S.Hut. M.Hut NIP. 19781111 200212 2 005	Pembina (IV/a)	Kabid Usaha Mikro	S.2
6	Suparno, SH. MH NIP. 19770503 200212 1 006	Pembina (IV/a)	Kabid Perdagangan	S.2
7	Mahmudi Herman, S.Si.M.Si NIP. 19840412 200803 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Metrologi Legal	S.2
8	Kadarisno, S.Si,M.I.I NIP. 19831006 200902 1 002	Pembina (IV/a)	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	S.1
9	Kaharudin, SE NIP. 19701116 200502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Penyusunan Program	S.1
10	Sarkusi, SE NIP. 19700702 199803 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Perindustri dan Perdagangan	S.1

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
11	Milwan Riswandi, S.Hut NIP. 19770315 199903 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Perindustri dan Perdagangan	S.1
12	Jani, ST NIP. 19760607 200701 1 014	Penata Tingkat I (III/d)	Fasilitator Kewirausahaan	S.1
13	Uray Titin Martini, SE NIP. 19740301 199903 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Aset	S.1
14	Budi Apriyanto, SP NIP. 19790401 201101 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda	S.1
15	Muizi, SE NIP. 19680730 200003 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Pengawas Koperasi Ahli Muda	S.1
16	Bambang Krisharyanto, ST NIP. 19761219 201101 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Penilai Pelayanan Kemetrollogian	S.1
17	Munandar, S.IP NIP. 19800606 200312 1 001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	S.1
18	Akhmad Mulyadi, S. Hum NIP. 19730806 200604 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	S.1
19	Salina, S.Hum NIP. 19801024 200701 2 011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	S.1
20	Aldino Muskari, SE NIP. 19900923 202012 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Perkembangan Harga & Pengkajian Pasar	S.1
21	Ade Nugraha, ST NIP. 19890307 202203 1 003	Penata Muda (III/a)	Penera Ahli Muda	S.1
22	Hari Sandi, SE NIP. 19890816 202203 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengawas Koperasi Ahli Muda	S.1
23	Rizma Mustika Sari, S.TP NIP. 19930713 202203 2 006	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Pertama	S.1
24	Rabunah NIP. 19660603 199003 2 005	Penata Muda (III/a)	Juru Pungut	SMA
25	Musa, S.T.P NIP. 19961027 202203 1 007	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Pertama	S.1
26	Anugerah, S.Si NIP. 19940925 202504 1 002	Penata Muda (III/a)	Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama	S.1
27	Rusli NIP. 19690124 198807 1 001	Penata Muda (III/a)	Juru Pungut	SMA
28	Satrio NIP. 19730112 200801 1 012	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	SMEA
29	Al Mubarak, SE NIP. 19991223 202504 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	S.1
30	Raysya Nusantara, S.M NIP. 20000619 202504 2 007	Penata Muda (III/a)	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Pertama	S.1
31	Juliyanti, S.M NIP. 20020731 202504 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Pertama	S.1
32	Anzar Andianta, A.Md.A.B NIP. 19970405 202504 1 004	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	D.3
33	Muslimin NIP. 19810913 200701 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Izin Usaha	SMA

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Indra Gunawan, SH	-	Honorer	S.1
2	Laila Kadariasih, S.Kom	-	Honorer	S.1
3	Vitanopiani, SP	-	Honorer	S.1
4	Rina, SE	-	Honorer	S.1
5	Mia Aryyesti, SE	-	Honorer	S.1
6	Soraya Nurfiza, S.Ak	-	Honorer	S1
7	Nur Adelia, S.S.T	-	Honorer	D4
8	Andika Saputra, A.Md	-	Honorer	D3
9	Heni Susilawati, A.Md	-	Honorer	D3
10	Andrianto, A.Md	-	Honorer	D3
11	Safitri, A.Md	-	Honorer	D3
12	U. Levi Subhanizar	-	Honorer	SLTA
13	Iswadi	-	Honorer	SLTA
14	Franki	-	Honorer	SLTA
15	Nurmansyah	-	Honorer	SLTA
16	Naila Zulfa	-	Honorer	SLTA
17	Zulpiana	-	Honorer	SMP
18	Mulina	-	Honorer	SMP
19	Joni	-	Honorer	SD

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	6	3	9	66,67%	33,33%	27,27%
2	Fungsional	5	0	5	100,00%	0,00%	15,15%
3	Pelaksana	14	5	19	73,68%	26,32%	57,58%
	Jumlah	25	8	33	75,76%	24,24%	100,00%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	1	0	1	100,00%	0,00%	7,14%
2	Eselon III	3	2	5	60,00%	40,00%	35,71%
3	Eselon IV	7	1	8	87,50%	12,50%	57,14%
	Jumlah	11	3	14	78,57%	21,43%	100,00%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	6	2	8	75,00%	25,00%	24,24%
2	Golongan III	17	6	23	73,91%	26,09%	69,70%
3	Golongan II	2	0	2	100,00%	0,00%	6,06%
	Jumlah	25	8	33	75,76%	24,24%	100,00%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2	4	2	6	66,67%	33,33%	150,00%
2	D4/S1	17	5	22	77,27%	22,73%	550,00%
3	D1-D3	1	0	1	100,00%	0,00%	25,00%
4	SLTA	3	1	4	75,00%	25,00%	12,12%
	Jumlah	25	8	33	75,76%	24,24%	100,00%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana (Aset dan Modal)
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

No	Uraian	Jumlah	Keterangan*
1	Gedung Kantor	3 unit	
2	Galeri UMKM	1 unit	
3	Rumah Tenun	1 unit	
4	Rumah Rotan	1 unit	
5	Kendaraan Roda Empat	2 unit	
6	Kendaraan Roda Dua	20 unit	
7	Komputer	10 unit	
8	Laptop	17 unit	
9	Printer	16 unit	
10	Faximile	1 unit	
11	AC	14 unit	

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa saat ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mempunyai 2 unit gedung kantor sebagai tempat kerja dan 1 unit sebagai tempat pertemuan. Terdapat pula kendaraan dinas operasional baik roda empat maupun roda dua, dan sarana berupa komputer dan peralatan lainnya. Disamping itu terdapat juga gedung yang dimanfaatkan sebagai galeri UMKM dan 1 unit rumah tenun serta 1 unit rumah rotan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome*

dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Pencapaian kinerja pelayanan DISKUMINDAG Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator kinerja DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9 (T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	35	40	42,82	43,91	45,17	38,56	41,92	44,55	46,97	47,9	110,17	104,80	104,04	106,97	106,04
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase pertumbuhan usaha mikro	-	-	0,64	0,66	0,68	-	-	7,35	13,29	32,98	-	-	1148,44	2013,64	4850,00
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	-	-	10	11	12	-	-	23,31	12,89	12,08	-	-	233,10	117,18	100,67
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	-	-	<9%	<9%	<9%	-	-	7,85	5,53	4,79	-	-	112,78	138,56	146,78
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	-	-	10	12	14	-	-	12.200,90	27	65,31	-	-	122.009	225,00	466,50
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	1,80	1,82	10,80	10,97	11,35	6,16	10,27	20,07	18,78	14,29	342,22	564,29	185,83	171,19	125,90

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Capaian-Capaian Penting Pembangunan Di Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024

1. Persentase Koperasi Aktif

Sebuah koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif apabila koperasi yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya.

Persentase koperasi aktif menggambarkan seberapa besar persentase koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi

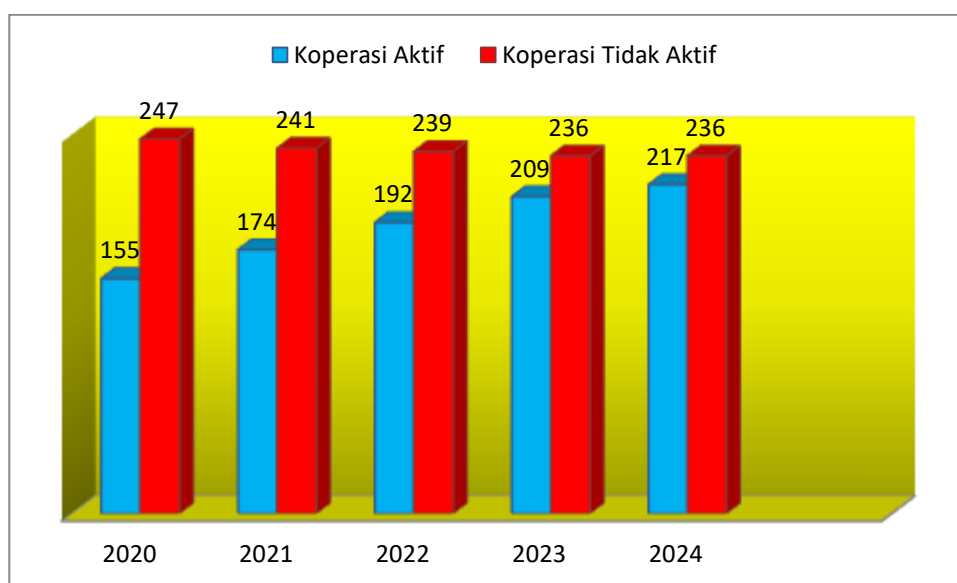
Tabel. 2.10
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Unit				
1	Koperasi Aktif	155	174	192	209	217
2	Koperasi Tidak Aktif	247	241	239	236	236
	Total	402	415	431	445	453

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar 2.2

Jumlah Koperasi AKtif dan Tidak AKtif Tahun 2020 - 2024



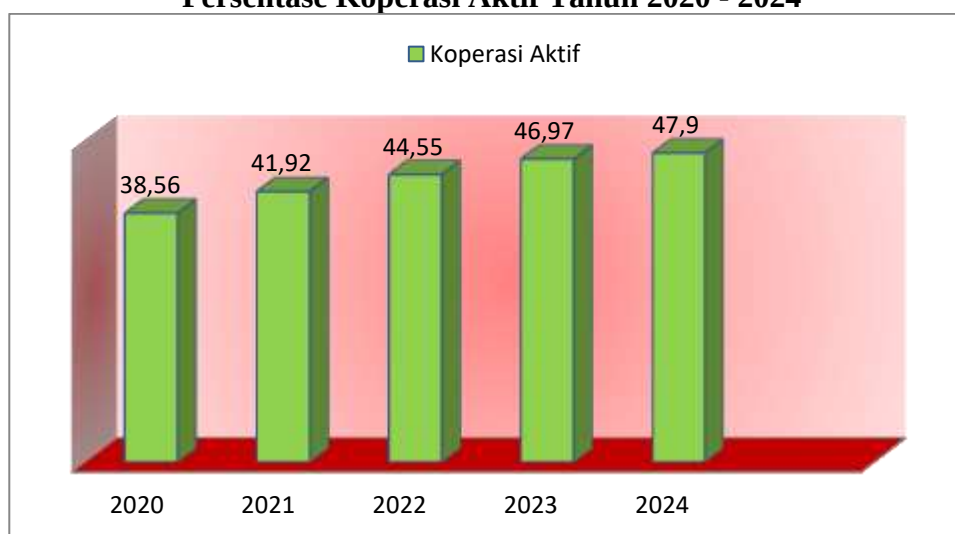
Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Tabel. 2.11
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Koperasi Aktif	38,56	41,92	44,55	46,97	47,90

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar 2.3
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020 - 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Indikator kinerja persentase koperasi aktif pada tahun 2020–2024 rata–rata mengalami kenaikan sebesar 2,33%. Terjadinya peningkatan koperasi aktif dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengurus koperasi dampak dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Indikator kinerja persentase koperasi aktif pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 35% (137 Unit koperasi) dari seluruh koperasi sebanyak 389 unit koperasi dan dapat terealisasi 38,56 % (155 unit koperasi) dengan capaian kinerja sebesar 110,17%. Pada tahun 2021 persentase koperasi aktif terealisasi sebesar 41,92% diatas target yang ditetapkan sebesar 40,00%, dan meningkat dari capaian tahun 2020.

Jumlah koperasi aktif tahun 2021 yaitu 174 Koperasi dan di tahun 2022 jumlah koperasi aktif mencapai 193 koperasi, artinya adanya peningkatan koperasi yang aktif sebanyak 19 koperasi di tahun 2022. Jumlah koperasi aktif yang terinput dalam database Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sambas sebanyak 192 Koperasi (44,55%), ini dikarenakan ada 1 koperasi yang pindah pembinaannya dari kabupaten ke propinsi yaitu Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Warga Husada. Pindahnya pembinaan tersebut karena Koperasi tersebut melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi yang mana salah satu anggotanya atau kepengurusan berdomisili/bertempat tinggal diluar Kabupaten Sambas. Sehingga semula jumlah 432 unit koperasi menjadi 431 unit koperasi.

Target indikator kinerja persentase koperasi aktif pada tahun 2023 sebesar 43,91% (195 Unit koperasi) dengan realisasi sebesar 46,97% atau 209 koperasi aktif dari seluruh koperasi sebanyak 445 Unit Koperasi yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Sambas.

Target indikator kinerja persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 45,17% (201 Unit koperasi) dengan realisasi sebesar 47,90% atau 217 koperasi aktif dari seluruh koperasi sebanyak 453 Unit Koperasi yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Sambas.

Tabel 2.12
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Perkecamatan Tahun 2024

No	KECAMATAN	Konsumen		Produsen		Simpan Pinjam		Jasa		Pemasaran		Total
		Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	Aktif	Tdk. Aktif	
1	KEC. SELAKAU	1	0	4	12	0	0	0	0	0	0	17
2	KEC. SELAKAU TIMUR	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	6
3	KEC. SALATIGA	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
4	KEC. PEMANGKAT	5	4	5	23	0	0	1	1	0	0	39
5	KEC. SEMPARUK	1	1	3	4	0	0	1	1	0	0	11
6	KEC. TEBAS	5	17	13	14	1	0	1	1	3	0	55
7	KEC. TEKARANG	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	6
8	KEC. JAWAI	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0	15
9	KEC. JAWAI SELATAN	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6
10	KEC. SEBAWI	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	6
11	KEC. SAMBAS	18	44	13	16	1	0	3	1	1	0	97
12	KEC. SUBAH	6	9	44	4	0	0	0	0	1	0	64
13	KEC. SAJAD	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
14	KEC. SEJANGKUNG	2	5	16	2	0	0	1	0	0	0	26
15	KEC. TELUK KERAMAT	3	7	4	4	0	0	0	0	0	0	18
16	KEC. TANGARAN	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	12
17	KEC. GALING	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0	15
18	KEC. PALOH	1	6	19	8	0	0	1	0	0	0	35
19	KEC. SAJINGAN BESAR	2	2	9	3	0	0	0	0	0	0	16
JUMLAH KOPERASI :		45	108	156	124	2	0	9	4	5	0	453
Koperasi Aktif		217										
Koperasi Tidak Aktif		236										

Sumber: DISKUMINDAG Kabupaten Sambas, Tahun 2024

Selanjutnya, dilihat persebarannya berdasarkan kecamatan (kondisi 2024), sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Sambas (97 unit atau 21,41%), dan di Kecamatan Subah (64 unit atau 14,13%), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan

Sajad (4 unit atau 0,88%). Berdasarkan dari jenis kegiatan usahanya, sebagian besar koperasi di Kabupaten Sambas adalah koperasi produsen (280 unit atau 61,81%), dan yang lainnya merupakan koperasi konsumen (153 unit atau 33,77%), koperasi jasa (13 unit atau 2,87%), koperasi pemasaran (5 unit atau 1,10%) dan koperasi simpan pinjam (2 unit atau 0,44%).

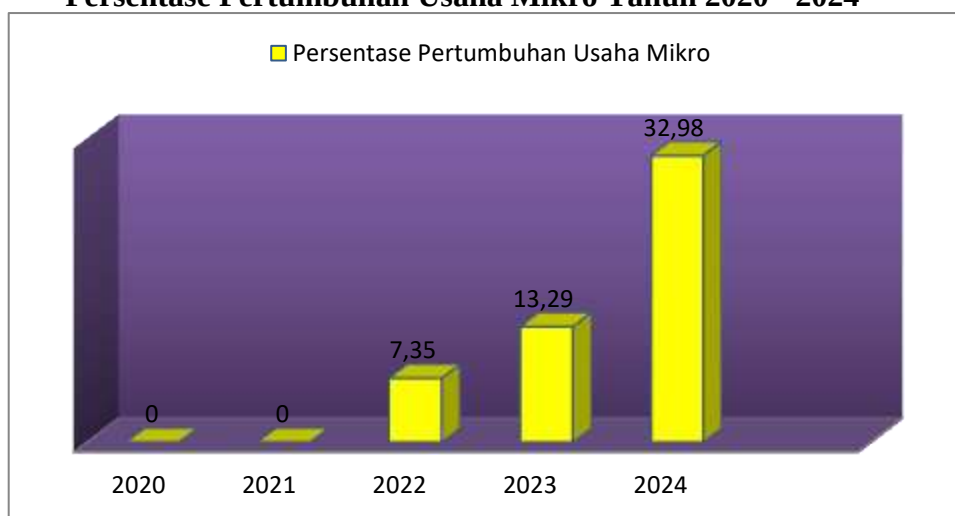
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Tabel. 2.13
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	-	-	7,35	13,29	32,98

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.4
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun 2020 - 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Target persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2022 sebesar 0,64% (123 unit usaha) dengan realisasi sebesar 7,35% (1.414 unit usaha) dari seluruh usaha mikro sebanyak 20.656 unit usaha. Tingginya capaian indikator kinerja adanya sinergisitas antar OPD dan Stakeholder melalui sosialisasi dan perizinan keliling dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur perizinan berbasis resiko dan mempermudah persyaratan perizinan usaha.

Target persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2023 sebesar 0,66% (128 unit usaha) dengan realisasi sebesar 13,29% (2.746 unit usaha) dari seluruh usaha mikro sebanyak 23.402 unit usaha. Target persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2024 sebesar 0,68% (133 unit usaha) dengan realisasi sebesar 32,98% (7.718 unit usaha) dari seluruh usaha mikro sebanyak 31.120 unit usaha.

Tabel. 2.14
Jumlah UKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sambas Tahun 2024

No	Bidang Usaha	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja			Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah asset (Rp.)
			L	P	Jumlah		
1	Mikro	31.120	35.596	6.458	2.054	1.155.648.379.110	3.752.580.952.200
2	Kecil	521	2.148	-	2.148	50.000.000	221.788.556.373
3	Menengah	88	1.821	-	1.821	1.221.995.315.000	70.832.939.500.000
Total		31.729	39.565	6.458	46.023	2.377.693.694.110	74.807.309.008.573

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Tabel. 2.15
REKAPITULASI DATA UMKM KABUPATEN SAMBAS
USAHA MIKRO PERKECAMATAN

No	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja			Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah asset (Rp.)
			L	P	Jumlah		
1	Galing	1.226	1.341	269	1.610	47.532.150.000	26.618.575.500
2	Jawai	1.908	1.789	422	2.211	81.532.776.500	68.855.364.536
3	Jawai Selatan	591	663	158	821	26.556.192.500	13.978.598.575
4	Paloh	1.972	1.723	658	2.381	74.280.890.000	53.493.367.700
5	Pemangkat	3.571	4.116	491	4.607	131.413.750.400	196.460.296.435
6	Sajad	306	262	111	373	16.110.115.000	6.682.600.500
7	Sajingan Besar	675	816	168	984	49.108.548.000	203.414.465.732
8	Salatiga	649	600	162	762	28.835.370.000	14.937.450.500
9	Sambas	4.865	7.643	616	8.259	163.769.043.802	1.339.046.503.976
10	Sebawi	763	677	251	928	38.542.075.000	258.288.205.932
11	Sejangkung	1.226	802	274	1.076	29.138.264.000	11.561.631.000
12	Selakau	2.260	2.378	597	2.975	65.888.898.421	55.151.369.900
13	Selakau Timur	231	478	71	549	13.270.701.000	247.439.665.340
14	Semparuk	1.619	1.748	284	2.032	49.045.483.600	48.765.457.000
15	Subah	817	2.002	214	2.216	36.849.565.000	907.450.102.649
16	Tangaran	903	804	228	1.032	38.663.160.000	16.098.641.942
17	Tebas	3.582	3.738	773	4.511	135.056.072.900	184.096.116.414
18	Tekarang	634	540	172	712	37.979.487.800	11.696.140.000
19	Teluk Keramat	3.322	3.476	539	4.015	92.075.835.187	88.546.398.569
Total		31.120	35.596	6.458	42.054	1.155.648.379.110	3.752.580.952.200

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Dari tabel 2.17 dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro terbanyak terdapat pada Kecamatan Sambas yaitu 2.923 unit usaha atau 15,19%. Terendah pada Kecamatan Selakau Timur yaitu 147 unit usaha atau 0,76%.

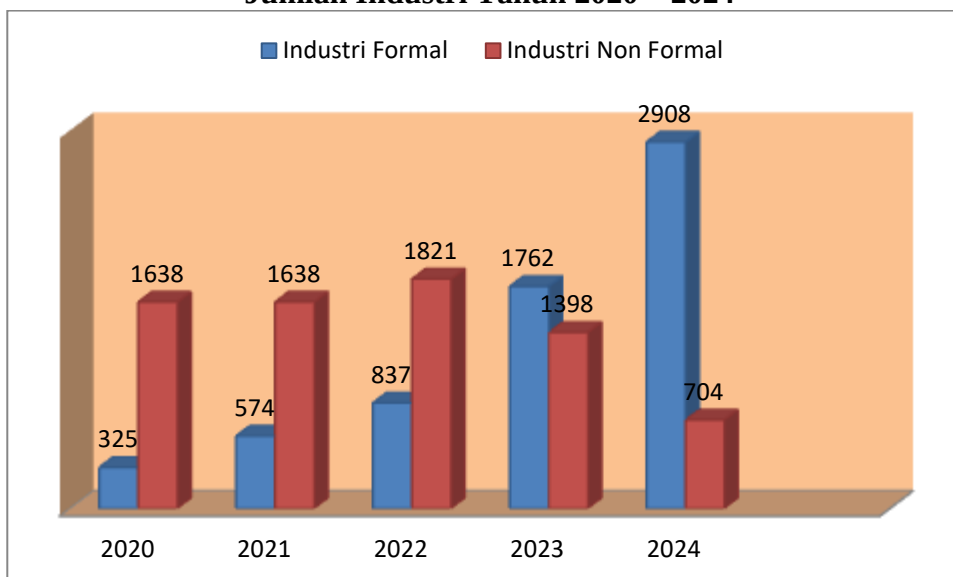
3. Pertumbuhan Industri

Tabel. 2.16
Jumlah Industri Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Unit				
1	Industri Formal	325	574	837	1.762	2.908
2	Industri Non Formal	1.638	1.638	1.821	1.398	704
	Total	2.963	2.212	2.658	3.160	3.612

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.5
Jumlah Industri Tahun 2020 – 2024



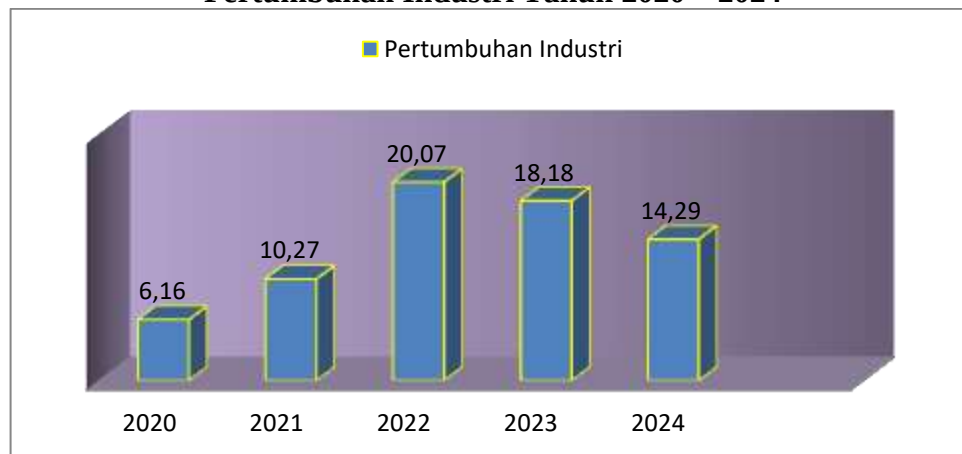
Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Tabel. 2.18
Pertumbuhan Industri Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Pertumbuhan Industri	6,61	10,27	20,07	18,78	14,29

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.6
Pertumbuhan Industri Tahun 2020 – 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Indikator kinerja persentase pertumbuhan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,80% (39 unit) dari jumlah seluruh industri sebanyak 1.898 unit dan dapat terealisasi sebesar 6,16% (117 Unit) dengan capaian kinerja sebesar 342,22%.

Pada tahun 2021, sektor industri kabupaten sambas tumbuh sebesar 10,27% diatas target yang ditetapkan sebesar 1,82%. Tercapainya target pertumbuhan industri ini antara lain disebabkan oleh regulasi perijinan yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil. Disamping itu kebijakan pemerintah tentang BPUM (bantuan bagi pelaku usaha mikro) memberikan dampak positif bagi pelaku usaha untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha.

Pada tahun 2021 realisasi jumlah IKM sebanyak 2.222 unit usaha. Pada tahun 2022 jumlah IKM berjumlah 2.668 unit usaha atau tumbuh sebesar 20,07 % dari target yang ditetapkan sebesar 10,80%. Tercapainya pertumbuhan industri ini antara lain disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana memberikan kemudahan perizinan untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah untuk membuat izin usaha tanpa komitmen (persyaratan khusus) dan pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi covid-19.

Pada tahun 2023 jumlah IKM berjumlah 3.169 unit usaha atau tumbuh sebesar 18,78 % dari target yang ditetapkan sebesar 10,97%.

Pada tahun 2024 jumlah IKM berjumlah 3.622 unit usaha atau tumbuh sebesar 14,29% dari target yang ditetapkan sebesar 11,35%. Tercapainya pertumbuhan industri ini antara lain disebabkan adanya :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana memberikan kemudahan perizinan untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah untuk membuat izin usaha tanpa komitmen (persyaratan khusus).
- Intensifnya pembinaan pelaku IKM melalui pelatihan, pendampingan promosi, penguatan kapasitas pada 4 (empat) sentra IKM, fasilitasi sertifikasi halal, pendampingan dalam pembuatan akun SIINAS dan fasilitasi sertifikasi TKDN dalam rangka peningkatan kualitas produk dan daya saing

Tabel 2.19
REKAPITULASI DATA INDUSTRI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

No	Kecamatan	INDUSTRI		TOTAL
		KECIL	BESAR	
1	Galing	72	1	73
2	Jawai	124	-	124
3	Jawai Selatan	73	-	73
4	Paloh	144	-	144
5	Pemangkat	313	-	313
6	Sajad	381	-	381
7	Sajingan Besar	60	1	61
8	Salatiga	34	-	34
9	Sambas	923	1	924
10	Sebawi	71	1	72
11	Sejangkung	263	1	264
12	Selakau	222	-	222
13	Selakau Timur	21	-	21
14	Semparuk	122	-	122
15	Subah	65	3	68
16	Tangaran	64	-	64
17	Tebas	323	2	325
18	Tekarang	31	-	31
19	Teluk Keramat	306	-	306
Total		3612	10	3622

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Industri Kecil terbanyak pada kecamatan sambas yaitu 923 unit usaha atau 25,55%. Pada Industri Besar terdapat 10 unit usaha yang terdiri dari komoditi CRUMB RUBBER di Kecamatan Sambas sebanyak 1 unit usaha; komoditi CPO di Kecamatan Sejangkung 1 unit usaha, Kecamatan Sebawi 1 unit usaha, Kecamatan Sajingan Besar 1 unit usaha, Kecamatan Subah 2 unit usaha, Kecamatan Tebas 1 unit usaha; dan komoditi CPO/CPKO yang terdiri dari Kecamatan

Tebas 1 unit usaha dan Kecamatan Subah 1 unit usaha, komoditi Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) di Kecamatan Galing.

4. Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Tabel. 2.20
Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	-	-	23,31	12,89	12,08

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.7
Persentase Pertumbuhan Omset Pedagang Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 - 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Rata-rata pertumbuhan omset pedagang tahun 2021 adalah Rp.73.490.142,62. Pada tahun 2022 persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ditargetkan 10% atau sebesar Rp.80.839.156,00. Pada tahun 2022 rata – rata pertumbuhan omset pedagang sebesar Rp.90.617.408 atau naik sebesar 23,31% sehingga dapat disimpulkan target tersebut tercapai.

Pada tahun 2023 persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ditargetkan 11% atau sebesar

Rp.101.491.498,43. Pada tahun 2023 rata – rata pertumbuhan omset pedagang sebesar Rp. 102.297.993,38 atau naik sebesar 12,89% sehingga dapat disimpulkan target tersebut tercapai.

Pada tahun 2024 persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ditargetkan 12% atau sebesar Rp.114.573.752,59. Pada tahun 2024 rata – rata pertumbuhan omset pedagang sebesar Rp. 114.653.566,43 atau naik sebesar 12,08% sehingga dapat disimpulkan target tersebut tercapai.

Tabel. 2.21
Profil Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS BANGUNAN	Asosiasi	PASAR Yang Digunakan	PASAR Pembangunan Tahun ini	KIOS		LOS		JUM LAH PAS AR	KON DISI PAS AR
						Jumlah	Yang ditempati	Jumlah	Yang ditempati		
1	Selakau	1. Bangunan Pasar Ikan, Ds. Parit Baru	√	YA	TIDAK	0	0	28	4	1	B
		2. Bangunan Pasar Sayur, Ds. Parit Baru	√	YA	TIDAK	0	0	4	1	1	B
		3. Bangunan Kios, Desa Parit Baru	√	YA	TIDAK	17	16	0	0	1	RB
		4. Bangunan Pasar Ayam, Ds. Parit Baru	-	YA	TIDAK	6	2	0	0	1	RB
		5. Pasar Rakyat Sei Nyirih	√	YA	TIDAK	7	7	6	4	1	B
		6. Pasar Ikan Semelagi	√	YA	TIDAK	0	0	6	1	1	RB
2	Pemangkat	1. Bang Kios (Jln. Banjar Kuala), Ds. Pmk. Kota	√	YA	TIDAK	36	4	0	0	1	RB
		2. Bangunan Pasar Sayur, Ds. Pemangkat Kota	√	YA	TIDAK	0	0	22	18	1	B
		3. Bangunan Pasar Ikan, Ds. Pemangkat Kota	√	YA	TIDAK	0	0	10	6	1	B
		4. Bangunan Pasar Daging Sapi, Ds. Pmk. Kota	-	YA	TIDAK	10	6	0	0	1	B
		5. Bangunan Pasar Ayam, Ds. Pmk. Kota	-	YA	TIDAK	0	0	9	5	1	RB
		6. Bangunan Pasar Babi, Ds. Pmk. Kota	√	YA	TIDAK	0	0	4	1	1	RB
		7. Bangunan Psr melayu, Ds. Pmk. Kota	√	YA	TIDAK	20	15	0	0	1	B
		8. Pasar Nelayan, Desa Penjajap	√	YA	TIDAK	2	2	5	5	1	B
		9. Pasar Kios Amat Bampek	√	YA	TIDAK	8	2	0	0	1	RB
3	Tebas	1. Bangunan Pasar Sayur, Desa Tebas Kuala	-	YA	TIDAK	0	0	26	14	1	RB
		2. Bangunan Kmr Daging Sapi, Desa Tebas Kuala	-	YA	TIDAK	6	5	0	0	1	B

NO	KECAMATAN	JENIS BANGUNAN	Asosiasi	PASAR Yang Digunakan	PASAR Pembangunan Tahun ini	KIOS		LOS		Jumlah PASAR	KONDISI PASAR
						Jumlah	Yang ditempati	Jumlah	Yang ditempati		
		3. Bangunan Psr Ikan, Desa Tebas Kuala	-	YA	TIDAK	0	0	9	2	1	RB
		4. Bangunan Psr Ayam, Desa Tebas Kuala	-	YA	TIDAK	0	0	7	7	1	RB
		5. Bangunan Kios Pasar Tebas, Desa Tebas Kuala	√	YA	TIDAK	7	7	0	0	1	B
		6. Inceramut, Desa Makrampai	√	YA	TIDAK	12	10	0	0	1	B
		7. Pasar Rakyat Tebas, Tebas Sungai	√	YA	TIDAK	42	30	114	42	1	B
		8. Pasar Pngkln Kongs Desa Pangkalan Kongs	√	YA	TIDAK	4	4	8	4	1	B
4	Jawai	1. Bangunan Psr Ikan, Desa Sentebang	√	YA	TIDAK	0	0	12	9	1	RR
	Sentebang	2. Bangunan Psr Sayur, Desa Sentebang	√	YA	TIDAK	0	0	16	16	1	B
5	Jawai Selatan	1. Bangunan Psr ikan dan ayam, Desa Matang Terap	√	YA	TIDAK	0	0	10	6	1	B
		2. Bangunan Psr Sayur, Desa Mtg. Terap	√	YA	TIDAK	0	0	16	16	1	B
		3. Pasar Babi, Desa Matang Terap	-	YA	TIDAK	0	0	6	2	1	B
6	Sambas	1. Bang Psr Sayur, Ikan, Ayam, Ds. Pendawan	-	YA	TIDAK	0	0	80	61	1	B
		2. Bang Los Eks Psr Buah/Sayur, Ds. Pendawan (Pasar Rakyat Sambas)	√	YA	TIDAK	0	0	31	31	1	B
		3. Psr Los Sayur Jagur, Desa Jagur	-	YA	TIDAK	0	0	12	11	1	RR
		4. Psr Ikan Ds Jagur Sambas, Desa Jagur	√	YA	TIDAK	0	0	14	10	1	RB
		5. Bang Kios Tionghua, Ds. Pasar Melayu.	√	YA	TIDAK	39	39	0	0	1	RR
		6. Bang Kios (Pasar Songket) (Pertokoan)	-	YA	TIDAK	9	9	0	0	1	B
		7. Pasar Kartiasa	√	YA	TIDAK	49	49	20	0	1	B
		8. Pasar ex. CNN (Pasar Melur)	√	YA	TIDAK	12	12	0	0	1	B
		9. Pasar Sentral Kuliner Sambas	√	YA	TIDAK	6	6	0	0	1	B
7	Sejangkung	1. Bang Psr Los, Desa Sejangkung	-	YA	TIDAK	0	0	1	0	1	RB
		2. Pasar Rakyat Sejangkung	√	YA	YA	15	5	76	0	1	B
8	Teluk Keramat	1. Bang Psr Sayur + ayam, Desa Sekura	√	YA	TIDAK	0	0	24	2	1	RR
		2. Pasar Rakyat Sekura, Desa Sekura	√	YA	TIDAK	24	3	0	0	1	B

NO	KECAMATAN	JENIS BANGUNAN	Asosiasi	PASAR Yang Digunakan	PASAR Pembangunan Tahun ini	KIOS		LOS		Jumlah PASAR	KONDISI PASAR
						Jumlah	Yang ditempati	Jumlah	Yang ditempati		
9	Paloh	1. Bang Kios Liku, Desa Nibung	-	YA	TIDAK	4	2	0	0	1	RB
		2. Bang Kios Desa Temajuk	-	YA	TIDAK	6	5	0	0	1	B
		3. Pasar Rakyat Temajuk	-	YA	YA	4	1	116	0	1	B
10	Sajingan Besar	1. Bang Kios, Desa Sebunga	√	YA	TIDAK	16	10	0	0	1	RR
		2. Bang Los, Desa Sebunga	√	YA	TIDAK	0	0	10	4	1	B
		3. Bang Kios Pertokoan Desa Sebunga (Pasar Sajingan Besar)	√	YA	TIDAK	8	5	0	0	1	B
11	Semparuk	1. Bang Los Ikan, Desa Semparuk	-	TIDAK	TIDAK	0	0	5	0	1	RB
		2. Bang Los Ayam, Desa Semparuk (Semparuk Sbk)	-	TIDAK	TIDAK	0	0	5	0	1	RB
12	Galing	1. Bangunan Los Pasar Ikan/Ayam	-	YA	TIDAK	0	0	9	0	1	RB
		2. Pasar Rakyat Galing	√	YA	YA	18	6	104	7	1	B
13	Sajad	1. Bangunan Kios	√	YA	TIDAK	5	3	0	0	1	B
		2. Bangunan Los	-	YA	TIDAK	0	0	4	1	1	B
14	Selakau Timur	1. Bangunan Kios Pasar Gelik	√	YA	TIDAK	6	4	0	0	1	B
		2. Bangunan Los Pasar Gelik	√	Ya	TIDAK	0	0	4	2	1	B
		3. Bangunan Kuliner Pasar Gelik	√	Ya	TIDAK	0	0	4	1	1	B
15	Subah	1. Los Pasar Kering Mukti Raharja	√	YA	TIDAK	0	0	10	4	1	B
		2. Los Pasar Basah Mukti Rakarja	√	YA	TIDAK	0	0	6	1	1	B
		3. Pasar Rakyat Sungai Sapak	√	YA	TIDAK	20	4	20	1	1	B
			40	57							
		JUMLAH				418	273	873	299	59	

Keterangan Jumlah Pasar/Bangunan Pasar	59	Pasar	RB = Rusak Berat	16	Pasar
Jumlah Los/Kios/Lapak	1291	Kios/Los	RR = Rusak Ringan	5	Pasar
Jumlah Pedagang	572	Orang	B = Baik.	38	Pasar

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Dari tabel 2.22 dapat dilihat bahwa jumlah pasar yang ada di Kabupaten Sambas berjumlah 59 pasar yang mana kondisi pasar dalam keadaan baik, rusak ringan dan rusak

berat. Dikategorikan rusak berat apabila pasar rusak lebih dari 50% dan dikatakan rusak ringan apabila pasar rusak 30 – 50%.

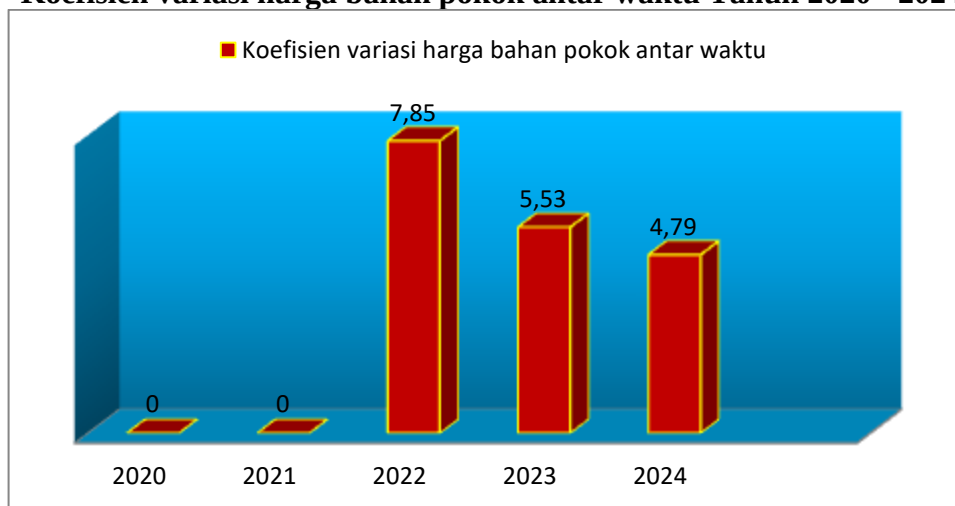
5. Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Tabel. 2.22
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	-	-	7,85	5,53	4,79

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.8
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu Tahun 2020 - 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Persentase Koefisien variasi harga antar waktu tahun 2022 mencapai 7, 85% dan masih berada dibawah target yaitu <9%.Tercapainya target di sebabkan oleh stabilnya harga dari beberapa komoditas bahan pokok seperti gula pasir dan daging ayam ras, dan dilaksanakannya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga seperti pasar murah telur dan monitoring harga bahan pokok.

Persentase Koefisien variasi harga antar waktu tahun 2023 mencapai 5,53% dan masih berada dibawah target yaitu <9%.Tercapainya target di sebabkan oleh telah dilaksanakannya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga seperti Operasi Pasar dan monitoring harga bahan pokok.

Persentase Koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2024 mencapai 4,75% dengan target untuk 2024 sebesar <9% (target tercapai). Tercapainya target di

sebabkan oleh cukup stabilnya harga dari beberapa komoditas bahan pokok seperti gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu serta dilaksanakannya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga seperti Operasi Pasar dan monitoring harga bahan pokok yang rutin dilakukan setiap hari.

6. Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas

Tabel 2.23
DATA EKSPOR KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 – 2024

NO	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rp. 8.522.252.301,-	Rp 136.773.110,-	Rp. 16.824.322.200,-	Rp 21.290.914.999,-	Rp. 20.625.985.973,-.

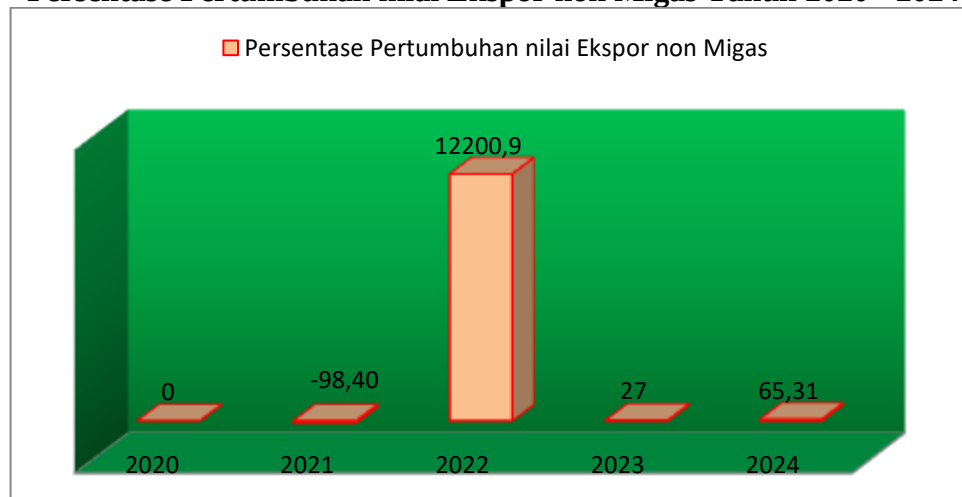
Sumber : Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete Kab. Sambas

Tabel. 2.24
Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas
Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		%				
1	Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas	-	-	12.200,90	27	65,31

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Gambar. 2.9
Persentase Pertumbuhan nilai Ekspor non Migas Tahun 2020 - 2024



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Pada tahun 2020 sejumlah 416 PEB (5 orang/Perusahaan) dengan nilai ekspor Rp.8.522.252.301,-. Kegiatan Ekspor di Kabupaten Sambas pada tahun 2021 masih dilakukan dengan tujuan ekspor ke Sarawak Malaysia melalui PLBN Aruk. Pada tahun

2021, terjadi penurunan Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal :

1. Masih berlanjutnya kondisi Pandemi Covid-19, sehingga pihak Pemerintah Malaysia masih menerapkan kebijakan Lock down dimana pintu border di PLBN Aruk masih ditutup yang berakibat kepada pemberhentian aktivitas perlintasan baik untuk orang maupun barang
2. Kondisi mutu produk ekspor Kabupaten Sambas yang sebagian besar masih belum memenuhi standard yang ditentukan oleh Importir sehingga masih sulit untuk menembus pasar di negara importir besar yang lainnya, sedangkan kegiatan ekspor ke Sarawak Malaysia yang telah dilakukan pada umumnya masih bersifat tradisional dimana buyer dari Malaysia merupakan pelaku usaha yang masih dalam skala kecil.

Realisasi nilai ekspor non migas pada tahun 2021 berjumlah Rp.136.773.110,00. Pada Tahun 2022 mencapai Rp. 16.824.322.200 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 10.311.925.284, hal ini ditunjang oleh beberapa hal yaitu dibukanya kembali PLBN aruk setelah ditutup pada saat terjadinya pandemi covid-19 dan telah dilakukannya kegiatan seperti Bimtek tentang teknis pelaksanaan Ekspor dan pendampingan dan failitasi kepada pelaku usaha ekspor dalam memenuhi kelengkapan administrasi untuk ekspor.

Realisasi nilai ekspor non migas pada tahun 2023 mencapai Rp.21.290.914.999 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp11.343.317.813,- (target tercapai) hal ini ditunjang oleh beberapa hal yang telah dilakukan seperti kegiatan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha ekspor yang telah mengikuti Bimtek pada tahun anggaran sebelumnya baik itu pendampingan dalam hal kelengkapan administrasi untuk ekspor maupun dalam hal promosi produk yang berpotensi untuk di ekspor.

Realisasi nilai ekspor non migas pada tahun 2024 mencapai Rp.20.625.985.973 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp12.477.429.594,- (target tercapai) hal ini ditunjang oleh beberapa hal yang telah dilakukan seperti kegiatan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha ekspor yang ada di Kabupaten Sambas baik itu pendampingan dalam hal kelengkapan administrasi untuk ekspor maupun dalam hal promosi produk unggulan yang berpotensi untuk di ekspor.

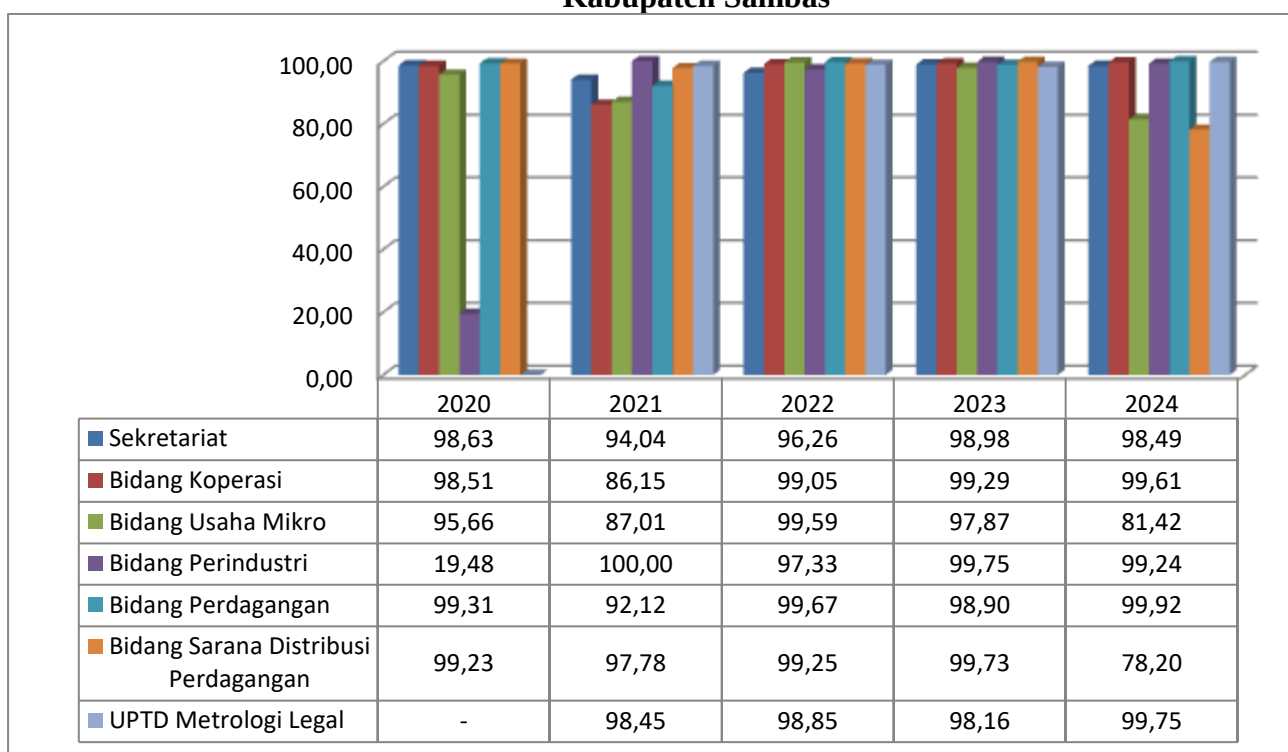
Tabel 2.25 (T-C 24)
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

No	Nama unit kerja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dari anggaran tahun ke-					Rata - rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Sekretariat	1.289.760.867,35	3.967.924.794,00	4.566.780.736,00	5.708.126.747,00	4.959.258.047,00	1.272.140.526,00	3.731.399.509,00	4.395.921.490,00	5.649.628.717,00	4.884.449.652,00	98,63	94,04	96,26	98,98	98,49	917.374.295	903.077.282
2	Bidang Koperasi	200.133.760,00	606.239.152,00	1.030.732.000,00	1.305.881.760,00	530.787.408,00	197.155.425,00	522.288.632,40	1.020.912.956,00	1.296.614.966,00	528.694.762,00	98,51	86,15	99,05	99,29	99,61	82.663.412	82.884.834
3	Bidang Usaha Mikro	803.851.000,00	913.168.129,00	967.632.000,00	1.732.636.800,00	1.404.371.434,00	768.967.059,00	794.543.980,20	963.621.622,00	1.695.672.764,00	1.143.496.678,00	95,66	87,01	99,59	97,87	81,42	150.130.109	93.632.405
4	Bidang Perindustri	1.907.398.260,00	5.457.403.775,00	12.341.098.360,00	1.685.024.760,00	3.301.068.314,00	371.590.865,00	5.457.403.775,00	12.011.291.366,00	1.680.895.091,00	3.275.834.375,00	19,48	100,00	97,33	99,75	99,24	348.417.514	726.060.878
5	Bidang Perdagangan	3.136.352.780,00	452.556.203,00	434.976.814,00	824.714.279,00	1.562.597.987,00	3.114.639.939,00	416.874.118,00	433.547.208,00	815.648.366,00	1.561.310.929,00	99,31	92,12	99,67	98,90	99,92	-393.438.698	-388.332.253
6	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	721.929.280,00	1.532.524.321,00	2.128.964.000,00	2.401.603.099,00	1.356.396.746,00	716.355.290,00	1.498.466.176,00	2.112.920.330,00	2.395.188.934,00	1.060.747.288,00	99,23	97,78	99,25	99,73	78,20	158.616.867	86.098.000
7	UPTD Metrologi Legal	-	141.299.095,00	299.372.000,00	339.736.653,00	560.747.408,00	-	139.105.722,80	295.943.223,00	333.496.510,00	559.317.882,00	-	98,45	98,85	98,16	99,75	140.186.852	139.829.471
Jumlah		8.059.425.947,35	13.071.115.469,00	21.769.555.910,00	13.997.724.098,00	13.675.227.344,00	6.440.849.104,00	12.560.081.913,40	21.234.158.195,00	13.867.145.348,00	13.013.851.566,00	79,92	96,09	97,54	99,07	95,16	1.263.763.497	1.503.421.145

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kondisi jumlah anggaran dari tahun 2020 – 2024 bersifat fluktuatif. Kondisi ini disebabkan antara lain karena adanya sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya setiap tahun berfluktuasi. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa rata – rata pertumbuhan anggaran mengalami penurunan (negatif). Adapun rasio antara jumlah anggaran dengan realisasi tahun 2020 sebesar 79,92% disebabkan karena dana DAK yang tidak dapat direalisasikan. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, realisasi anggaran cukup baik yaitu rata – rata 96,97%.

Gambar. 2.12
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas



Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan bidang perdagangan meliputi pelaku usaha perdagangan (ritel lokal toko modern, pedagang pasar, pedagang kaki lima) melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan monitoring.

Kelompok sasaran pelayanan bidang perindustrian meliputi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan monitoring.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

a. Bidang Koperasi

1. Kemampuan manajerial pengelola koperasi masih rendah
2. Kurangnya adaptasi dengan sistem informasi terkini
3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi keperluan akan sarana dan prasarana usaha
4. Terbatasnya informasi jaringan pemasaran dan akses permodalan bagi koperasi
5. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk

b. Bidang Usaha Mikro

1. Belum optimalnya sinergisitas program kegiatan antar dinas terkait untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kemampuan manajerial pengelola usaha mikro masih rendah
3. Kurangnya kemampuan usaha mikro untuk memenuhi keperluan akan sarana dan prasarana usaha
4. Terbatasnya informasi jaringan pemasaran dan akses permodalan bagi usaha mikro
5. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk

c. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.
2. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terbina.
3. Terdapat bangunan pasar yang baik dan atau rusak ringan, namun tidak digunakan karena lokasi bangunan yang dianggap kurang strategis, sehingga tidak ada pedagang yang memanfaatkan dan akibatnya tidak dapat dipungut retribusinya.
4. Masih Rendahnya kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi tempat usaha. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak dilakukan retribusi.

5. Dari 59 pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, terdapat 21 pasar dalam kondisi rusak, baik rusak ringan sampai rusak berat yang perlu segera untuk ditangani.
6. Belum optimalnya, pengelola pasar disebabkan tidak ada pengelola pasar yang ditunjuk untuk memudahkan monitoring, pelola kebersihan, listrik, air dan lain – lain.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan gudang SRG.

d. Bidang Perdagangan

1. Tantangan dalam Peningkatan Ekspor
2. Perdagangan luar negeri /ekspor Kabupaten Sambas masih didominasi oleh produk-produk hulu berupa komoditas pertanian.
3. Efektivitas Pengawasan Barang
4. Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan dampak negatif terhadap perdagangan dalam negeri (masuknya bahan pangan ilegal dari negara tetangga ke Kabupaten Sambas bahkan KALBAR seperti gula) dan industri dalam negeri (masuknya bokar ke negara tetangga).
5. Masih rendahnya pengetahuan pengusaha/pedagang tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perdagangan khususnya peraturan tentang ekspor.
6. Masih rendahnya kepedulian masyarakat sebagai konsumen terhadap pelanggaran dan peredaran barang – barang yang tidak layak edar sebagai laporan terhadap pelanggaran tersebut masih sangat rendah.
7. Masih rendahnya perhatian dan kerjasama pedagang terhadap kebijakan pemerintah daerah.
8. Masih lemahnya pengawasan terhadap ketersediaan dan pengendalian harga barang-barang pokok dan barang penting lainnya.
9. Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor
10. Promosi produk unggulan daerah masih sangat terbatas dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

e. Bidang UPTD Metrologi Legal

1. Luasnya wilayah kerja UPTD ML, ditambah dengan kondisi geografis yang beragam memberikan hambatan pada pelaksanaan pendataan potensi UTTP (alat ukur timbang

takar dan perlengkapannya). Kondisi ini semakin berat dikarenakan SDM Kemetrolagian yang minim (3 PNS, 2 Honorer) dan sarana mobilitas yang sudah tua.

2. Belum terdapat petugas pengawas Kemetrolagian yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban tera dan tera ulang alat UTTPnya.
3. Tidak tersedianya mobilitas yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah dengan medan yang berat tetap memiliki potensi UTTP yang besar.
4. Kurangnya SDM yang berkopeten dibidang kemetrolagian sehingga pelaksanaan hal-hal yang tertuang dalam dokumen mutu menemui kesulitan.
5. Standar ukuran yang belum dapat diverifikasi disebabkan oleh banyaknya standar kerja yang harus diverifikasi dan terbatasnya anggaran untuk memverifikasi semua standar ukuran.

f. Bidang Perindustrian

1. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah.
2. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang.
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk IKM.
5. Masih banyak pelaku IKM yang belum melakukan registrasi perizinan ke akun SIINAS.
6. Masih terbatasnya pengetahuan pelaku IKM dalam mengakses regulasi perizinan berusaha berbasis resiko (OSSRBA)
7. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku IKM dalam aspek manajemen usaha sehingga belum memiliki orientasi business.
8. Terbatasnya kompetensi SDM IKM dalam aspek standarisasi kualitas sehingga daya saing produk belum optimal
9. Pembinaan dan pengawasan perijinan masih belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan

bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dapat ditentukan isu-isu strategis :

1. Masih kurangnya Kualitas Koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat.
2. Masih rendahnya Sumber daya manusia pengelola Koperasi , khususnya yang berbasis masyarakat.
3. Pertumbuhan UKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh ketrampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
4. Penumbuhan wira usaha baru (WUB), dengan menitikberatkan pada ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada melalui bimbingan teknis kewirausahaan.
5. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan,
6. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
7. Transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran seluruh masyarakat.
8. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih
9. Peningkatan manajemen pengelolaan pasar
10. Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pasar rakyat
11. Fasilitasi pelatihan secara berjenjang, bertahap dan berkelanjutan yang selanjutnya akan dilakukan monitoring secara continue.
12. Pengembangan produk IKM melalui perbaikan kemasan, difersifikasi produk, dan kualitas produk.
13. Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengakses pasar online, melalui pelatihan penggunaan platform digital untuk memperluas akses pasar. IKM didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online, sehingga IKM mampu

beradaptasi, berinovasi, dan serta membaca tren akan kebutuhan pasar dalam negeri maupun global.

14. Fasilitasi Produk IKM, meliputi perijinan berusaha, sertifikasi, branding, hak kekayaan intelektual, dan penguatan sentra IKM; yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap penerapan sistem manajemen mutu, manajemen produksi, proses sertifikasi SNI, pengujian produk. Dengan penerapan sistem manajemen mutu, diharapkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan dapat terjaga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Berkah Berkemajuan**”, Berkah adalah sebuah Akrononim **Bersama Kuatkan Langkah**, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah **BER**sinergi, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan **Sambas BERKEMAJUAN**: Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Ber**iman kepada Allah SWT, **Kem**andirian, **Maju**, **Ber**kelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar.

Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai **BER**sinergi, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan.

Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni Kemampuan membangun kolaborasi antar OPD, masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/OPD yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada Musrenbang Desa dan Kabupaten.

Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni Meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, inovasi, dan pencapaian yang unggul dibanding wilayah lain, indikatornya meliputi Peringkat Kabupaten Sambas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan atau diaplikasikan, Jumlah UMKM lokal yang naik kelas (mikro → kecil → menengah), Capaian indeks literasi digital, pendidikan, dan vokasi.

Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni Tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator Ukuran meliputi Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik, Jumlah kasus penyimpangan anggaran yang ditindaklanjuti oleh APIP (inspektorat).

Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator Ukuran meliputi, Indeks kerukunan umat beragama (bisa mengacu pada data Kemenag), Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sambas berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai implementasi dari asta cita. Visi Kabupaten Sambas juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, Dan Berwawasan Lingkungan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sambas dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
5. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 3 yaitu meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah.

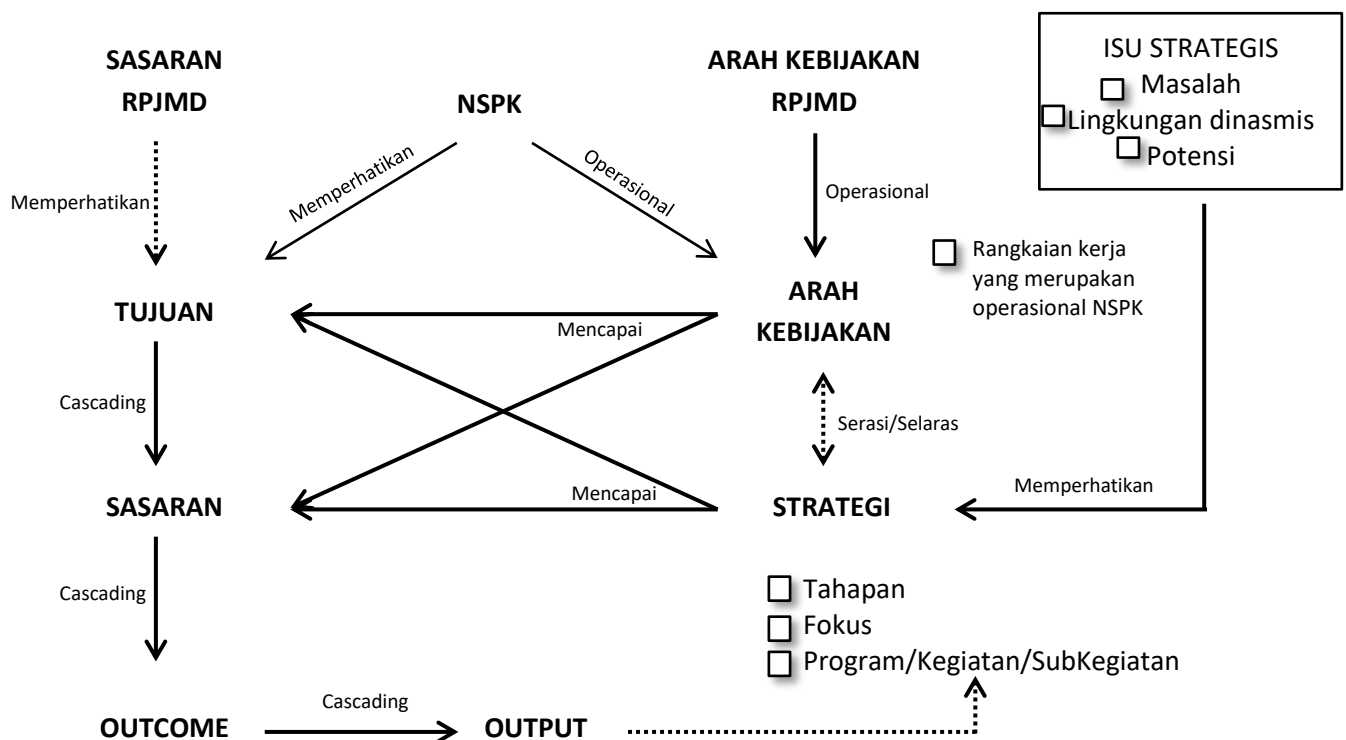
Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan pembinaan koperasi, usaha mikro dan IKM serta membuka akses pemasaran produk – produk unggulan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Secara umum tujuan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam pembangunan, pengembangan, penjabaran adalah

“meningkatnya perkembangan koperasi, usaha kecil, menengah, kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah”

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas



3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, yang merupakan penjabaran lebih spesifik dan terukur dari suatu tujuan. Sasaran juga dapat diartikan sebagai target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya lebih operasional dan terinci dibandingkan dengan tujuan. Sasaran Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan koperasi sehat
2. Meningkatnya proporsi jumlah pelaku usaha UMKM
3. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Meningkatnya Perkembangan Ekspor
5. Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan
6. Meningkatnya proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
7. Meningkatnya pertumbuhan industri

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
- Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan - Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital - Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah	Meningkatnya perkembangan koperasi, usaha kecil, menengah, kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	-	0.60	0.62	0.64	0.66	0.68	0.70	
			Rasio Kewirausahaan (Persentase)	-	2.65	2.80	2.98	3.05	3.25	3.41	
			Nilai Ekspor Barang dan Jasa (Rp)	20.625.985.973	13.725.172.553	15.097.689.808	16.607.458.789	18.268.204.668	20.095.025.135	22.104.527.648	
			Indeks Perkembangan Harga (%)	1.34	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
			Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17.88	17.80-18.08	17.82-18.10	17.84-18.12	17.86-18.14	17.88-18.16	17.90-18.18	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11.57	11.6-12.40	11.65-12.45	11.70-12.50	11.75-12.55	11.80-12.60	11.85-12.70	
		Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	47.90	48.24	48.80	49.35	49.89	50.42	50.93	
		Meningkatnya proporsi jumlah pelaku usaha UMKM	Proporsi jumlah pelaku UMKM (%)	0	5.60	6.30	6.98	7.65	8.30	8.94	
		Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antarwaktu (%)	4.79	1-8.9	1-8.9	1-8.9	1-8.9	1-8.9	1-8.9	
		Meningkatnya Perkembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor non migas (%)	0	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (%)	0	4.99	5.00	5.01	5.02	5.03	5.04	
		Meningkatnya proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	0	77.00	84.00	85.69	87.49	89.40	91.41	
		Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	14.29	16.57	16.82	16.93	17.08	17.11	17.14	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pengesahan Badan Hukum melalui fasilitasi Badan Hukum Koperasi, aktivasi koperasi tidak aktif;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui penilaian kesehatan KSP/USP, fasilitasi penyusunan SOP / SOP, fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pengembangan manajemen usaha simpan pinjam;
3. fasilitasi pengembangan distribusi dan jaringan kemitraan usaha bagi KUMKM;
4. Fasilitasi peningkatan akses pemasaran melalui pameran, kontak dagang, temu usaha, peningkatan jaringan pemasaran baik dalam negeri dan melalui sistem informasi teknologi;
5. peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan manajemen Usaha Mikro Kecil.
6. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sentra IKM dan Mendorong transformasi Digital UKM dan IKM;
7. Mengembangkan potensi industri kecil berdasarkan kompetensi inti, Pengembangan Daerah berbasis dokumen RPIP;
8. Peningkatan tertib niaga melalui pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan;
9. Pengawasan dan penertiban bersama pihak terkait terhadap usaha ekonomi masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan;
10. Melaksanakan kerjasama teknis dengan stakeholder dan instansi terkait;
11. Pengembangan aparatur dan penguatan SDM pengelola sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pelayanan publik;
12. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan;
13. Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas;
14. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar;

15. Fasilitasi pelayanan dan sarana prasarana kebersihan pasar;
16. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar;
17. Regulasi terhadap pengelolaan pasar dan tarif retribusi;

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

1. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer
2. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif
3. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual
4. Revitalisasi pasar-pasar tradisional
5. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima
6. Meningkatkan pengawasan harga komoditas
7. Meningkatkan pengawasan harga
8. Revitalisasi pasar-pasar tradisional
9. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah;
10. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan;
11. Penyusunan data potensi pasar
12. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi Menguatkan kemampuan kewirausahaan
13. Memperluas akses jaringan pemasaran
14. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		- Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan industri - Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor	1. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer 2. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		- Peningkatan pertumbuhan omset Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas - Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok - Meningkatkan ketersediaan pangan - Meningkatkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha - Meningkatkan rasio wirausaha berskala mikro naik kelas - Perizinan Pendaftaran Perusahaan - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi - stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual 4. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 5. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima 6. Meningkatkan pengawasan harga komoditas 7. Meningkatkan pengawasan harga 8. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 9. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah; 10. Penyempurnaan terhadap perangkat peraturan; 11. Penyusunan data potensi pasar 12. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola KUMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi - Menguatkan kemampuan kewirausahaan 13. Memperluas akses jaringan pemasaran 14. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan UKM	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Penyusunan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, program yang dilaksanakan dibagi menjadi beberapa urusan yaitu urusan Koperasi dan UKM, urusan perindustrian dan urusan perdagangan.

- a. Urusan Koperasi dan UKM
 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Koperasi;
 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi UMKM;
 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
 7. Program Pengembangan UMKM.
- b. Urusan Perindustrian
 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Urusan Perdagangan
 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 4. Program Pengembangan Ekspor;

- 5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- d. Urusan Adminitrasi Umum
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 4.1 Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.326.797.379,56		8.661.322.107,75		9.313.323.718,06		9.694.159.760,85		10.102.475.331,70	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.721.641.379,56		5.928.262.107,75		6.387.373.718,06		6.624.929.760,85		6.877.875.331,70	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	-	100	100	5.721.641.379,56	100	5.928.262.107,75	100	6.387.373.718,06	100	6.624.929.760,85	100	6.877.875.331,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					144.500.000,00		146.000.000,00		149.500.000,00		150.300.000,00		83.600.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	0.5	1.0	144.500.000,00	1.5	146.000.000,00	2.0	149.500.000,00	2.5	150.300.000,00	3.0	83.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					269.000.000,00		272.000.000,00		293.000.000,00		299.000.000,00		323.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16.78	17.90	18.79	269.000.000,00	19.65	272.000.000,00	20.50	293.000.000,00	21.33	299.000.000,00	22.15	323.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					192.300.000,00		197.500.000,00		200.800.000,00		203.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%)	-	0.11	0.14	192.300.000,00	0.16	197.500.000,00	0.18	200.800.000,00	0.20	203.000.000,00	0.23	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					236.000.000,00		237.500.000,00		239.800.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	-	0.57	0.59	236.000.000,00	0.62	237.500.000,00	0.64	239.800.000,00	0.67	240.000.000,00	0.69	252.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					448.356.000,00		450.560.000,00		459.850.000,00		468.930.000,00		488.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	50.77	51.53	52.06	448.356.000,00	52.57	450.560.000,00	53.07	459.850.000,00	53.57	468.930.000,00	54.05	488.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					771.000.000,00		874.500.000,00		1.001.000.000,00		1.116.000.000,00		1.240.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	-	6.80	7.03	771.000.000,00	7.89	874.500.000,00	8.03	1.001.000.000,00	8.71	1.116.000.000,00	8.91	1.240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					544.000.000,00		555.000.000,00		582.000.000,00		592.000.000,00		598.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas (%)	0.77	0.79	1.64	544.000.000,00	2.56	555.000.000,00	3.55	582.000.000,00	4.65	592.000.000,00	5.77	598.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.388.586.323,19		4.515.188.426,34		4.755.402.575,65		4.871.964.395,31		5.022.770.356,31	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					405.023.000,00		407.840.000,00		412.713.000,00		415.737.000,00		419.215.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	-	100	100	405.023.000,00	100	407.840.000,00	100	412.713.000,00	100	415.737.000,00	100	419.215.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.222.563.323,19		2.244.848.426,34		2.314.689.575,65		2.328.227.395,31		2.382.555.356,31	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	-	15.25	16.95	2.222.563.323,19	18.64	2.244.848.426,34	20.34	2.314.689.575,65	22.03	2.328.227.395,31	23.73	2.382.555.356,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					650.000.000,00		703.500.000,00		796.000.000,00		835.000.000,00		887.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting (%)	---	1.0-8.9	1.0-8.9	650.000.000,00	1.0-8.9	703.500.000,00	1.0-8.9	796.000.000,00	1.0-8.9	835.000.000,00	1.0-8.9	887.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					480.000.000,00		510.000.000,00		530.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang non migas (Rp)	206259859 73	13725172 553	1509768 9808.30	480.000.000,00	1660745 8789.13	510.000.000,00	18268204 668.04	530.000.000,00	2009502 5134.84	550.000.000,00	2210452 7648.33	570.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					400.000.000,00		415.000.000,00		447.000.000,00		476.000.000,00		494.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	29.03	30.75	32.29	400.000.000,00	33.83	415.000.000,00	35.36	447.000.000,00	36.90	476.000.000,00	38.44	494.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					231.000.000,00		234.000.000,00		255.000.000,00		267.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas (%)	-	7.0	7.7	231.000.000,00	8.4	234.000.000,00	9.1	255.000.000,00	9.8	267.000.000,00	10.5	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					2.560.000.000,00		2.650.500.000,00		2.984.000.000,00		3.120.818.696,00		3.237.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN					2.285.000.000,00		2.350.000.000,00		2.588.000.000,00		2.689.318.696,00		2.780.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	13.56	13.62	14.00	2.285.000.000,00	14.29	2.350.000.000,00	14.61	2.588.000.000,00	14.80	2.689.318.696,00	15.23	2.780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal (%)	-	10.00	12.15		15.00		17.50		20.00		22.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA					120.000.000,00		130.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	-	70	75	120.000.000,00	80	130.000.000,00	85	170.000.000,00	90	190.000.000,00	95	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					155.000.000,00		170.500.000,00		226.000.000,00		241.500.000,00		257.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini (Dokumen)	-	1	1	155.000.000,00	1	170.500.000,00	1	226.000.000,00	1	241.500.000,00	1	257.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					15.275.383.702,75		15.827.010.534,09		17.052.726.293,71		17.686.942.852,16		18.362.245.688,01	

4.2 Uraian Kegiatan

Penyusunan kegiatan didasarkan pada turunan dari program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas antara lain :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.3. Pengadaan Mebel
 - 5.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 5.6. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 5.7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5.8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5.9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 7.4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 7.5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

8. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 8.1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

9. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 9.1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

10. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 10.1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- 10.2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

D PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

11. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 11.1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11.2. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

E. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

12. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 12.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

13. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 13.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- 13.2. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- 13.3. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 13.4. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- 13.5. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 13.6. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 13.7. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- 13.8. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

14. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 14.1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 14.2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- 14.3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 14.4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

- 14.5 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- 14.6 Pemulihan Usaha Mikro
- 14.7 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
- 14.8 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
- 14.9 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
- 14.10 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 14.11 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- 14.12 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
- 14.13 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

H. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

15. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- 15.1. Pengembangan Usaha Mikro
- 15.2 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
- 15.3 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
- 15.4 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
- 15.5 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

I. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

16. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

- 16.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 16.2 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik

17. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- 17.1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- 18. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**
 - 18.1 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
 - 18.2 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
 - 18.3 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik
 - 18.4 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
- 19. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri**
 - 19.1 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri
 - 19.2 Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
 - 19.3 Fasilitas Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
 - 19.4 Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
- 20. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**
 - 20.1 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
 - 20.2 Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C
- 21. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
 - 21.1 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

- 21.2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
- 21.3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- J. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
- 22. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
 - 22.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 22.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 22.3 Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
 - 22.4 Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
- 23. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
 - 23.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - 23.2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- K. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
- 24. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
 - 24.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 24.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 24.3 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- 25. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
 - 25.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - 25.2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

- 25.3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- L. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
- 26. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 26.2 Pameran Dagang Nasional
- 26.3 Pameran Dagang Lokal
- 26.4 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- 26.5 Peningkatan Citra Produk Ekspor
- M. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
- 27. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
- 27.1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
- 27.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 27.3 Penyidikan Metrologi Legal
- N. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**
- 28. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
- 28.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
- 28.2 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 28.3 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- O. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
- 29. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**
- 29.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 29.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 29.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Industri

- 29.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 29.5 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 29.6 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 29.7 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
- 29.8 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 29.9 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

P. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

30. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

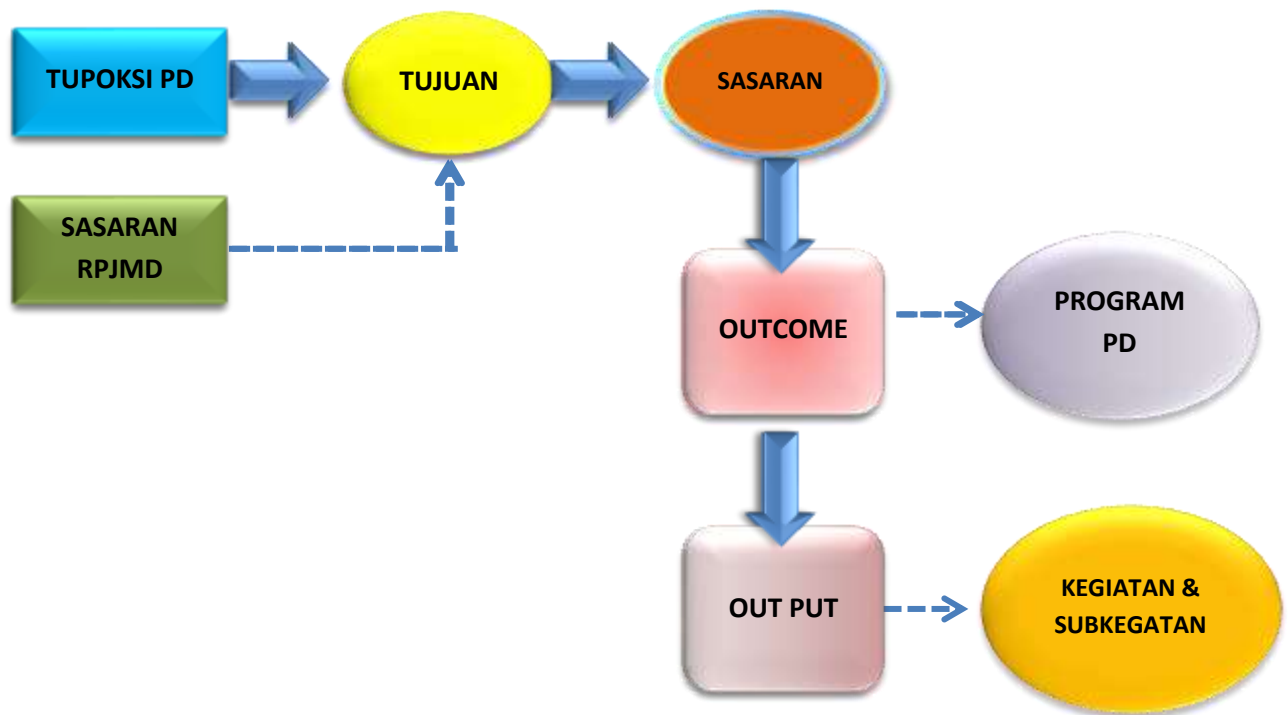
- 30.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- 30.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Q. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

31. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- 31.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 31.2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- 31.3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Resntra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
- Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan - Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah - Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital	Meningkatnya perkembangan koperasi, usaha kecil, menengah, kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
					Rasio Kewirausahaan		
					Nilai Ekspor Barang dan Jasa		
					Indeks Perkembangan Harga		
					Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		
					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		
		Meningkatnya perkembangan koperasi sehat			Persentase Koperasi Aktif		
					Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
					Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
					Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya produktivitas kooperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas kooperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya proporsi jumlah pelaku usaha UMKM			Proporsi jumlah pelaku UMKM		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase usaha mikro yang naik kelas	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Pertambahan usaha mikro naik kelas	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah yang Difasilitasi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antarwaktu		
					Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu C. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perkembangan Ekspor			Persentase nilai ekspor non migas		
					Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
					Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
					Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
					Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persentase pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah		
					Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			Proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan		
					Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	3.30.02.2.03.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
					Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03.0003 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.03.0004 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
					Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	3.30.02.2.04.0002 - Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.04.0003 - Fasilitas Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
				Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.05.0002 - Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
		Meningkatnya pertumbuhan industri			Persentase Pertumbuhan Industri		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sumber daya IKM yang Dibina	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan)	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel 4.3

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.326.797.379,56		8.661.322.107,75		9.313.323.718,06		9.694.159.760,85		10.102.475.331,70		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.721.641.379,56		5.928.262.107,75		6.387.373.718,06		6.624.929.760,85		6.877.875.331,70		
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	-	100	5.721.641.379,56	100	5.928.262.107,75	100	6.387.373.718,06	100	6.624.929.760,85	100	6.877.875.331,70	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	4	21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.424.195.392,43		4.569.053.760,68		4.890.532.719,46		5.061.318.739,75		5.238.811.082,70	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah dokumen administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	34	4.005.430.436,43	35	4.150.075.110,68	35	4.471.475.823,46	35	4.637.776.739,75	35	4.814.851.082,70	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	381.764.956,00	1	381.978.650,00	1	382.056.896,00	1	386.542.000,00	1	386.960.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.005.430.436,43		4.150.075.110,68		4.471.475.823,46		4.637.776.739,75		4.814.851.082,70	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	34	4.005.430.436,43	35	4.150.075.110,68	35	4.471.475.823,46	35	4.637.776.739,75	35	4.814.851.082,70	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				381.764.956,00		381.978.650,00		382.056.896,00		386.542.000,00		386.960.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	381.764.956,00	1	381.978.650,00	1	382.056.896,00	1	386.542.000,00	1	386.960.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				136.500.000,00		150.620.000,00		160.430.000,00		163.000.000,00		163.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	29.530.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	7	36.500.000,00	7	37.000.000,00	7	37.500.000,00	7	38.000.000,00	7	38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	74.500.000,00	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	4	15.000.000,00	4	18.620.000,00	4	18.900.000,00	4	19.000.000,00	4	19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20.000.000,00		25.000.000,00		29.530.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	29.530.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.000.000,00		70.000.000,00		74.500.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	74.500.000,00	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000,00		18.620.000,00		18.900.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	4	15.000.000,00	4	18.620.000,00	4	18.900.000,00	4	19.000.000,00	4	19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				36.500.000,00		37.000.000,00		37.500.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	7	36.500.000,00	7	37.000.000,00	7	37.500.000,00	7	38.000.000,00	7	38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				465.510.787,13		477.393.347,07		591.860.998,60		648.532.021,10		720.530.249,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	59.648.216,00	1	59.987.625,00	1	61.876.255,00	1	62.548.963,00	1	63.452.620,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	95	240.005.745,00	96	242.311.090,00	98	341.415.201,00	100	395.913.234,00	115	461.520.829,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	85.856.826,13	1	87.594.632,07	1	89.569.542,60	1	89.569.824,10	1	90.056.800,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				23.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				85.856.826,13		87.594.632,07		89.569.542,60		89.569.824,10		90.056.800,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	85.856.826,13	1	87.594.632,07	1	89.569.542,60	1	89.569.824,10	1	90.056.800,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				59.648.216,00		59.987.625,00		61.876.255,00		62.548.963,00		63.452.620,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	59.648.216,00	1	59.987.625,00	1	61.876.255,00	1	62.548.963,00	1	63.452.620,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.005.745,00		242.311.090,00		341.415.201,00		395.913.234,00		461.520.829,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	95	240.005.745,00	96	242.311.090,00	98	341.415.201,00	100	395.913.234,00	115	461.520.829,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				145.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.545.200,00		326.805.000,00		335.660.000,00		341.189.000,00		342.144.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	164.856.200,00	1	168.546.000,00	1	170.564.000,00	1	172.896.000,00	1	172.896.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	140.689.000,00	1	147.659.000,00	1	153.896.000,00	1	156.543.000,00	1	156.948.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.500.000,00	1	3.600.000,00	1	3.700.000,00	1	3.750.000,00	1	3.800.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00		3.600.000,00		3.700.000,00		3.750.000,00		3.800.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.500.000,00	1	3.600.000,00	1	3.700.000,00	1	3.750.000,00	1	3.800.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				164.856.200,00		168.546.000,00		170.564.000,00		172.896.000,00		172.896.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	164.856.200,00	1	168.546.000,00	1	170.564.000,00	1	172.896.000,00	1	172.896.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				140.689.000,00		147.659.000,00		153.896.000,00		156.543.000,00		156.948.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	140.689.000,00	1	147.659.000,00	1	153.896.000,00	1	156.543.000,00	1	156.948.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.890.000,00		170.390.000,00		174.890.000,00		176.890.000,00		179.390.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	1	29.500.000,00	1	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	34	25.000.000,00	34	26.500.000,00	34	28.000.000,00	34	29.000.000,00	34	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	18	16.000.000,00	18	17.000.000,00	18	18.000.000,00	18	18.500.000,00	18	19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.980.000,00		41.980.000,00		41.980.000,00		41.980.000,00		41.980.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	1	41.980.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.910.000,00		35.910.000,00		35.910.000,00		35.910.000,00		35.910.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	1	35.910.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		26.500.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	34	25.000.000,00	34	26.500.000,00	34	28.000.000,00	34	29.000.000,00	34	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		29.500.000,00		30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	1	29.500.000,00	1	30.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	18	16.000.000,00	18	17.000.000,00	18	18.000.000,00	18	18.500.000,00	18	19.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA				144.500.000,00		146.000.000,00		149.500.000,00		150.300.000,00		83.600.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	1.0	144.500.000,00	1.5	146.000.000,00	2.0	149.500.000,00	2.5	150.300.000,00	3.0	83.600.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				73.000.000,00		74.000.000,00		74.500.000,00		74.800.000,00		76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	10	12	73.000.000,00	13	74.000.000,00	14	74.500.000,00	15	74.800.000,00	20	76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan				73.000.000,00		74.000.000,00		74.500.000,00		74.800.000,00		76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	10	12	73.000.000,00	13	74.000.000,00	14	74.500.000,00	15	74.800.000,00	20	76.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				71.500.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		75.500.000,00		7.600.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	71.500.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.500.000,00	1	7.600.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.02.2.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				71.500.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		75.500.000,00		7.600.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	71.500.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.500.000,00	1	7.600.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN				269.000.000,00		272.000.000,00		293.000.000,00		299.000.000,00		323.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	16.78	18.79	269.000.000,00	19.65	272.000.000,00	20.50	293.000.000,00	21.33	299.000.000,00	22.15	323.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				269.000.000,00		272.000.000,00		293.000.000,00		299.000.000,00		323.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	15	25	134.000.000,00	30	135.000.000,00	35	145.000.000,00	40	149.000.000,00	45	158.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	42	50	135.000.000,00	55	137.000.000,00	60	148.000.000,00	65	150.000.000,00	70	165.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				134.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		149.000.000,00		158.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	15	25	134.000.000,00	30	135.000.000,00	35	145.000.000,00	40	149.000.000,00	45	158.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				135.000.000,00		137.000.000,00		148.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	42	50	135.000.000,00	55	137.000.000,00	60	148.000.000,00	65	150.000.000,00	70	165.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN				192.300.000,00		197.500.000,00		200.800.000,00		203.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	-	0.14	192.300.000,00	0.16	197.500.000,00	0.18	200.800.000,00	0.20	203.000.000,00	0.23	240.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				192.300.000,00		197.500.000,00		200.800.000,00		203.000.000,00		240.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0	3	77.300.000,00	4	77.500.000,00	8	77.800.000,00	6	78.000.000,00	7	85.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0	3	115.000.000,00	4	120.000.000,00	5	123.000.000,00	6	125.000.000,00	7	155.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				115.000.000,00		120.000.000,00		123.000.000,00		125.000.000,00		155.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0	3	115.000.000,00	4	120.000.000,00	5	123.000.000,00	6	125.000.000,00	7	155.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				77.300.000,00		77.500.000,00		77.800.000,00		78.000.000,00		85.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0	3	77.300.000,00	4	77.500.000,00	8	77.800.000,00	6	78.000.000,00	7	85.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN				236.000.000,00		237.500.000,00		239.800.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	-	0.59	236.000.000,00	0.62	237.500.000,00	0.64	239.800.000,00	0.67	240.000.000,00	0.69	252.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				236.000.000,00		237.500.000,00		239.800.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90	90	236.000.000,00	120	237.500.000,00	150	239.800.000,00	180	240.000.000,00	210	252.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				236.000.000,00		237.500.000,00		239.800.000,00		240.000.000,00		252.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90	90	236.000.000,00	120	237.500.000,00	150	239.800.000,00	180	240.000.000,00	210	252.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN				448.356.000,00		450.560.000,00		459.850.000,00		468.930.000,00		488.000.000,00		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	50.77	52.06	448.356.000,00	52.57	450.560.000,00	53.07	459.850.000,00	53.57	468.930.000,00	54.05	488.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				448.356.000,00		450.560.000,00		459.850.000,00		468.930.000,00		488.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase koperasi yang dilakukan pemberdayaan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pemodalannya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	0	3	24.356.000,00	4	24.560.000,00	5	24.850.000,00	6	24.930.000,00	7	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	6	215.000.000,00	7	215.000.000,00	8	216.000.000,00	9	217.000.000,00	10	218.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	112	6	130.000.000,00	7	130.000.000,00	8	135.000.000,00	9	140.000.000,00	10	145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0	2	32.000.000,00	3	34.000.000,00	4	36.000.000,00	5	38.000.000,00	6	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	0	3	17.000.000,00	4	17.000.000,00	5	18.000.000,00	6	19.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				24.356.000,00		24.560.000,00		24.850.000,00		24.930.000,00		35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Penaksanannya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	3	24.356.000,00	4	24.560.000,00	5	24.850.000,00	6	24.930.000,00	7	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				17.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Penaksanannya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	0	3	17.000.000,00	4	17.000.000,00	5	18.000.000,00	6	19.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				215.000.000,00		215.000.000,00		216.000.000,00		217.000.000,00		218.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	6	215.000.000,00	7	215.000.000,00	8	216.000.000,00	9	217.000.000,00	10	218.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				130.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	112	6	130.000.000,00	7	130.000.000,00	8	135.000.000,00	9	140.000.000,00	10	145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan teknis	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	10.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0	2	32.000.000,00	3	34.000.000,00	4	36.000.000,00	5	38.000.000,00	6	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,				771.000.000,00		874.500.000,00		1.001.000.000,00		1.116.000.000,00		1.240.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	7.03	771.000.000,00	7.89	874.500.000,00	8.03	1.001.000.000,00	8.71	1.116.000.000,00	8.91	1.240.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				771.000.000,00		874.500.000,00		1.001.000.000,00		1.116.000.000,00		1.240.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	150	20.000.000,00	200	30.000.000,00	250	40.000.000,00	300	50.000.000,00	350	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	634	770	293.000.000,00	790	299.500.000,00	840	319.000.000,00	890	332.000.000,00	900	345.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	100	110.000.000,00	150	115.000.000,00	220	130.000.000,00	300	140.000.000,00	400	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0	500	30.000.000,00	500	40.000.000,00	500	50.000.000,00	500	60.000.000,00	500	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0	100	37.000.000,00	125	38.000.000,00	150	39.000.000,00	200	40.000.000,00	250	50.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	120	30.000.000,00	140	40.000.000,00	160	50.000.000,00	180	60.000.000,00	200	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0	100	30.000.000,00	150	40.000.000,00	200	50.000.000,00	250	60.000.000,00	300	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	517	744	90.000.000,00	890	100.000.000,00	1068	110.000.000,00	1282	120.000.000,00	1548	130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	34	48	31.000.000,00	58	32.000.000,00	70	33.000.000,00	84	34.000.000,00	100	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0	100	37.000.000,00	125	38.000.000,00	150	39.000.000,00	200	40.000.000,00	250	50.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	34	48	31.000.000,00	58	32.000.000,00	70	33.000.000,00	84	34.000.000,00	100	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	517	744	90.000.000,00	890	100.000.000,00	1068	110.000.000,00	1282	120.000.000,00	1548	130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				110.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	100	110.000.000,00	150	115.000.000,00	220	130.000.000,00	300	140.000.000,00	400	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	50	40.000.000,00	60	50.000.000,00	90	60.000.000,00	120	70.000.000,00	150	80.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0	100	30.000.000,00	150	40.000.000,00	200	50.000.000,00	250	60.000.000,00	300	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	150	20.000.000,00	200	30.000.000,00	250	40.000.000,00	300	50.000.000,00	350	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	35	58	20.000.000,00	75	30.000.000,00	95	40.000.000,00	120	50.000.000,00	150	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	120	30.000.000,00	140	40.000.000,00	160	50.000.000,00	180	60.000.000,00	200	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0	500	30.000.000,00	500	40.000.000,00	500	50.000.000,00	500	60.000.000,00	500	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				293.000.000,00		299.500.000,00		319.000.000,00		332.000.000,00		345.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	634	770	293.000.000,00	790	299.500.000,00	840	319.000.000,00	890	332.000.000,00	900	345.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07. .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				544.000.000,00		555.000.000,00		582.000.000,00		592.000.000,00		598.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0.77	1.64	544.000.000,00	2.56	555.000.000,00	3.55	582.000.000,00	4.65	592.000.000,00	5.77	598.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				544.000.000,00		555.000.000,00		582.000.000,00		592.000.000,00		598.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Pertambahan usaha mikro naik kelas	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	150	51.000.000,00	200	52.000.000,00	250	53.000.000,00	300	54.000.000,00	350	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	120	200	185.000.000,00	250	189.000.000,00	300	192.000.000,00	350	195.000.000,00	400	196.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1	65.000.000,00	1	69.000.000,00	1	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah yang Difasilitasi	0	150	51.000.000,00	180	52.000.000,00	210	53.000.000,00	240	54.000.000,00	270	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	170	215.000.000,00	220	217.000.000,00	270	219.000.000,00	320	220.000.000,00	370	222.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	150	51.000.000,00	200	52.000.000,00	250	53.000.000,00	300	54.000.000,00	350	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	0	150	51.000.000,00	180	52.000.000,00	210	53.000.000,00	240	54.000.000,00	270	55.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01.0004 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				42.000.000,00		45.000.000,00		65.000.000,00		69.000.000,00		70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0	1	42.000.000,00	1	45.000.000,00	1	65.000.000,00	1	69.000.000,00	1	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				215.000.000,00		217.000.000,00		219.000.000,00		220.000.000,00		222.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	170	215.000.000,00	220	217.000.000,00	270	219.000.000,00	320	220.000.000,00	370	222.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				185.000.000,00		189.000.000,00		192.000.000,00		195.000.000,00		196.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	120	200	185.000.000,00	250	189.000.000,00	300	192.000.000,00	350	195.000.000,00	400	196.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				4.388.586.323,19		4.515.188.426,34		4.755.402.575,65		4.871.964.395,31		5.022.770.356,31		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN				405.023.000,00		407.840.000,00		412.713.000,00		415.737.000,00		419.215.000,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-	100	405.023.000,00	100	407.840.000,00	100	412.713.000,00	100	415.737.000,00	100	419.215.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				65.023.000,00		65.840.000,00		66.713.000,00		67.737.000,00		68.215.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayan Perizinan Berusaha	0	12	31.456.000,00	12	32.045.000,00	12	32.657.000,00	12	32.978.000,00	12	33.056.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	2	33.567.000,00	2	33.795.000,00	2	34.056.000,00	2	34.759.000,00	2	35.159.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha				33.567.000,00		33.795.000,00		34.056.000,00		34.759.000,00		35.159.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	2	33.567.000,00	2	33.795.000,00	2	34.056.000,00	2	34.759.000,00	2	35.159.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha				31.456.000,00		32.045.000,00		32.657.000,00		32.978.000,00		33.056.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Database Berusaha melalui	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem	0	12	31.456.000,00	12	32.045.000,00	12	32.657.000,00	12	32.978.000,00	12	33.056.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0	7	31.000.000,00	9	32.000.000,00	11	33.000.000,00	13	34.000.000,00	15	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0	7	31.000.000,00	9	32.000.000,00	11	33.000.000,00	13	34.000.000,00	15	35.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Penziman Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0	3	23.000.000,00	4	23.000.000,00	5	23.000.000,00	6	23.000.000,00	7	23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0	3	23.000.000,00	4	23.000.000,00	5	23.000.000,00	6	23.000.000,00	7	23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.30.02.2.03.0003 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.03.0004 - Fasmas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik			20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.03.0004 - Fasmas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri	0	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	0	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik	0	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.04.0002 - Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.04.0003 - Fasilitas Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	0	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.04.0004 - Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	0	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang	0	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.05.0002 - Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang	0	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribus, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				98.000.000,00		99.000.000,00		102.000.000,00		103.000.000,00		105.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	0	12	52.000.000,00	12	53.000.000,00	12	56.000.000,00	12	57.000.000,00	12	59.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	4	22.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Distributor B2 (P-B2)				52.000.000,00		53.000.000,00		56.000.000,00		57.000.000,00		59.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0	12	52.000.000,00	12	53.000.000,00	12	56.000.000,00	12	57.000.000,00	12	59.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA				2.222.563.323,19		2.244.848.426,34		2.314.689.575,65		2.328.227.395,31		2.382.555.356,31		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	16.95	2.222.563.323,19	18.64	2.244.848.426,34	20.34	2.314.689.575,65	22.03	2.328.227.395,31	23.73	2.382.555.356,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.917.563.323,19		1.929.208.426,34		1.983.044.375,65		1.991.051.395,31		2.038.315.556,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	9	1.757.563.323,19	10	1.766.708.426,34	11	1.792.187.955,65	12	1.799.586.765,31	13	1.841.932.426,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36	38	75.000.000,00	39	76.000.000,00	40	78.956.420,00	41	79.025.630,00	42	81.254.600,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	0	1	35.000.000,00	1	35.500.000,00	1	46.500.000,00	1	46.850.000,00	1	47.582.330,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	0	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	65.400.000,00	1	65.589.000,00	1	67.546.200,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.757.563.323,19		1.766.708.426,34		1.792.187.955,65		1.799.586.765,31		1.841.932.426,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	9	1.757.563.323,19	10	1.766.708.426,34	11	1.792.187.955,65	12	1.799.586.765,31	13	1.841.932.426,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				75.000.000,00		76.000.000,00		78.956.420,00		79.025.630,00		81.254.600,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36	38	75.000.000,00	39	76.000.000,00	40	78.956.420,00	41	79.025.630,00	42	81.254.600,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				35.000.000,00		35.500.000,00		46.500.000,00		46.850.000,00		47.582.330,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terselenggarannya kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	0	1	35.000.000,00	1	35.500.000,00	1	46.500.000,00	1	46.850.000,00	1	47.582.330,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				50.000.000,00		51.000.000,00		65.400.000,00		65.589.000,00		67.546.200,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	0	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	65.400.000,00	1	65.589.000,00	1	67.546.200,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				305.000.000,00		315.640.000,00		331.645.200,00		337.176.000,00		344.239.800,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase jumlah pasar yang ada pengelola	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	12	170.000.000,00	12	175.640.000,00	12	176.845.200,00	12	177.523.000,00	12	179.654.800,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				170.000.000,00		175.640.000,00		176.845.200,00		177.523.000,00		179.654.800,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	12	170.000.000,00	12	175.640.000,00	12	176.845.200,00	12	177.523.000,00	12	179.654.800,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				135.000.000,00		140.000.000,00		154.800.000,00		159.653.000,00		164.585.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	12	135.000.000,00	12	140.000.000,00	12	154.800.000,00	12	159.653.000,00	12	164.585.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN				650.000.000,00		703.500.000,00		796.000.000,00		835.000.000,00		887.000.000,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting	---	1.0-8.9	650.000.000,00	1.0-8.9	703.500.000,00	1.0-8.9	796.000.000,00	1.0-8.9	835.000.000,00	1.0-8.9	887.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				150.000.000,00		151.500.000,00		166.000.000,00		185.000.000,00		207.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas a. Beras b. Tepung Terigu C. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	25.000.000,00	12	25.500.000,00	12	30.000.000,00	12	34.000.000,00	12	38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	30.000.000,00	12	30.500.000,00	12	36.000.000,00	12	39.000.000,00	12	45.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	12	95.000.000,00	12	95.500.000,00	12	100.000.000,00	12	112.000.000,00	12	124.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				25.000.000,00		25.500.000,00		30.000.000,00		34.000.000,00		38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	25.000.000,00	12	25.500.000,00	12	30.000.000,00	12	34.000.000,00	12	38.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				30.000.000,00		30.500.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00		45.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	30.000.000,00	12	30.500.000,00	12	36.000.000,00	12	39.000.000,00	12	45.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				95.000.000,00		95.500.000,00		100.000.000,00		112.000.000,00		124.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	12	95.000.000,00	12	95.500.000,00	12	100.000.000,00	12	112.000.000,00	12	124.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				500.000.000,00		552.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		680.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	460.000.000,00	1	470.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	95.000.000,00	12	96.000.000,00	12	110.000.000,00	12	115.000.000,00	12	120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	12	55.000.000,00	12	56.000.000,00	12	70.000.000,00	12	75.000.000,00	12	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				95.000.000,00		96.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	95.000.000,00	12	96.000.000,00	12	110.000.000,00	12	115.000.000,00	12	120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				55.000.000,00		56.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	12	55.000.000,00	12	56.000.000,00	12	70.000.000,00	12	75.000.000,00	12	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		470.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	460.000.000,00	1	470.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				480.000.000,00		510.000.000,00		530.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang non migas	206259859 73	1509768 9808.30	480.000.000,00	1660745 8789.13	510.000.000,00	18268204 668.04	530.000.000,00	20095025 134.84	550.000.000,00	22104527 648.33	570.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				480.000.000,00		510.000.000,00		530.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	11	215.000.000,00	12	220.000.000,00	13	225.000.000,00	14	230.000.000,00	15	235.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3	5	40.000.000,00	6	45.000.000,00	7	50.000.000,00	8	55.000.000,00	9	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	6	125.000.000,00	7	130.000.000,00	8	135.000.000,00	9	140.000.000,00	10	145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	7	100.000.000,00	8	115.000.000,00	9	120.000.000,00	10	125.000.000,00	11	130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	6	125.000.000,00	7	130.000.000,00	8	135.000.000,00	9	140.000.000,00	10	145.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				215.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	11	215.000.000,00	12	220.000.000,00	13	225.000.000,00	14	230.000.000,00	15	235.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				100.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	7	100.000.000,00	8	115.000.000,00	9	120.000.000,00	10	125.000.000,00	11	130.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3	5	40.000.000,00	6	45.000.000,00	7	50.000.000,00	8	55.000.000,00	9	60.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN				400.000.000,00		415.000.000,00		447.000.000,00		476.000.000,00		494.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	29.03	32.29	400.000.000,00	33.83	415.000.000,00	35.36	447.000.000,00	36.90	476.000.000,00	38.44	494.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				400.000.000,00		415.000.000,00		447.000.000,00		476.000.000,00		494.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	944	1050	280.000.000,00	1100	285.000.000,00	1150	295.000.000,00	1200	312.000.000,00	1250	320.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	88.000.000,00	10	95.000.000,00	10	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	64.000.000,00	1	69.000.000,00	1	74.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				280.000.000,00		285.000.000,00		295.000.000,00		312.000.000,00		320.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	944	1050	280.000.000,00	1100	285.000.000,00	1150	295.000.000,00	1200	312.000.000,00	1250	320.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				70.000.000,00		75.000.000,00		88.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	88.000.000,00	10	95.000.000,00	10	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal				50.000.000,00		55.000.000,00		64.000.000,00		69.000.000,00		74.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	64.000.000,00	1	69.000.000,00	1	74.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM				231.000.000,00		234.000.000,00		255.000.000,00		267.000.000,00		270.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas	-	7.7	231.000.000,00	8.4	234.000.000,00	9.1	255.000.000,00	9.8	267.000.000,00	10.5	270.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				231.000.000,00		234.000.000,00		255.000.000,00		267.000.000,00		270.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	2	88.000.000,00	0	89.000.000,00	2	95.000.000,00	2	98.000.000,00	2	99.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	15	83.000.000,00	20	84.000.000,00	25	90.000.000,00	30	93.000.000,00	35	94.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	46	60.000.000,00	40	61.000.000,00	40	70.000.000,00	40	76.000.000,00	40	77.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				60.000.000,00		61.000.000,00		70.000.000,00		76.000.000,00		77.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	46	60.000.000,00	40	61.000.000,00	40	70.000.000,00	40	76.000.000,00	40	77.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				83.000.000,00		84.000.000,00		90.000.000,00		93.000.000,00		94.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	15	83.000.000,00	20	84.000.000,00	25	90.000.000,00	30	93.000.000,00	35	94.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				88.000.000,00		89.000.000,00		95.000.000,00		98.000.000,00		99.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	2	88.000.000,00	0	89.000.000,00	2	95.000.000,00	2	98.000.000,00	2	99.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				2.560.000.000,00		2.650.500.000,00		2.984.000.000,00		3.120.818.696,00		3.237.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN				2.285.000.000,00		2.350.000.000,00		2.588.000.000,00		2.689.318.696,00		2.780.000.000,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal	-	12.15	2.285.000.000,00	15.00	2.350.000.000,00	17.50	2.588.000.000,00	20.00	2.689.318.696,00	22.50	2.780.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	13.56	14.00		14.29		14.61		14.80		15.23		2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2.285.000.000,00		2.350.000.000,00		2.588.000.000,00		2.689.318.696,00		2.780.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
Persentase sumber daya IKM yang Dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	450.000.000,00	1	455.000.000,00	1	470.000.000,00	1	480.000.000,00	1	490.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	1	330.000.000,00	1	350.000.000,00	1	360.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	0	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	
	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	1.120.000.000,00	1	1.145.000.000,00	1	1.228.000.000,00	1	1.239.318.696,00	1	1.250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				250.000.000,00		255.000.000,00		330.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	1	330.000.000,00	1	350.000.000,00	1	360.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				450.000.000,00		455.000.000,00		470.000.000,00		480.000.000,00		490.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	450.000.000,00	1	455.000.000,00	1	470.000.000,00	1	480.000.000,00	1	490.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				110.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.120.000.000,00		1.145.000.000,00		1.228.000.000,00		1.239.318.696,00		1.250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	1.120.000.000,00	1	1.145.000.000,00	1	1.228.000.000,00	1	1.239.318.696,00	1	1.250.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				70.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				55.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	0	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA				120.000.000,00		130.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	75	120.000.000,00	80	130.000.000,00	85	170.000.000,00	90	190.000.000,00	95	200.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)				120.000.000,00		130.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman	1	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	-	1	155.000.000,00	1	170.500.000,00	1	226.000.000,00	1	241.500.000,00	1	257.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				155.000.000,00		170.500.000,00		226.000.000,00		241.500.000,00		257.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	116.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	84.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.000.000,00	1	26.500.000,00	1	27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				60.000.000,00		65.000.000,00		84.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Penyediaan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	84.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				25.000.000,00		25.500.000,00		26.000.000,00		26.500.000,00		27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terdiseminasi dan Terpublikaskannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	0	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.000.000,00	1	26.500.000,00	1	27.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS				70.000.000,00		80.000.000,00		116.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	
Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	116.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	2.17.3.31.3.30.07 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel. 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas kooperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
3.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
4.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
5.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
6.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

NO	IKU	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Koperasi Aktif	%	47,9	48,24	48,80	49,35	49,89	50,42	50,93	
2	Proporsi jumlah pelaku UMKM	%	0	5,60	6,30	6,98	7,65	8,30	8,94	
3	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	%	0	4,99	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04	
4	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	%	4,79	1-8,9	1-8,9	1-8,9	1-8,9	1-8,9	1-8,9	
5	Persentase nilai Ekspor non migas	%	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Proporsi pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	0	77,00	84,00	85,69	87,49	89,40	91,41	
7	Persentase Pertumbuhan Industri	%	14,29	16,57	16,82	16,93	17,08	17,11	17,14	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel . 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	positif	Persentase	-	0.57	0.59	0.62	0.64	0.67	0.69	
3.	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	positif	%	-	0.11	0.14	0.16	0.18	0.20	0.23	
4.	Persentase usaha mikro yang menjadi wisrausaha	positif	%	-	6.80	7.03	7.89	8.03	8.71	8.91	
5.	Persentase usaha mikro yang naik kelas	positif	%	0.77	0.79	1.64	2.56	3.55	4.65	5.77	
6.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	-	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
7.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	Persentase	50.77	51.53	52.06	52.57	53.07	53.57	54.05	
8.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Persentase	16.78	17.90	18.79	19.65	20.50	21.33	22.15	
9.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
10.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
11.	Nilai ekspor barang non migas	positif	Rp	20.625.98 5.973	13.725. 172.553	15.097.689.8 08	16.607.45 8.789	18.268.20 4.668	20.095. 025.134	22.104.52 7.648	
12.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	%	29.03	30.75	32.29	33.83	35.36	36.90	38.44	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.	Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting	negatif	%	---	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	
14.	Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas	positif	%	-	7.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	
15.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	positif	Persentase	-	15.25	16.95	18.64	20.34	22.03	23.73	
16.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
17.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	positif	Persentase	-	70	75	80	85	90	95	
18.	Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	positif	%	13.56	13.62	14.00	14.29	14.61	14.80	15.23	
19.	Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal	positif	%	-	10.00	12.15	15.00	17.50	20.00	22.50	
20.	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	positif	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sambas yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselenggarakan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian

kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas ini.



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMPAS
dr. I KETUT SUKARJA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651010 199509 1 001



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 576 /DISKUMINDAG/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja

penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;

- b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 576/DISKUMINDAG/2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Muizi, SE/Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 3. Sarkusi, SE/Fungsional Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Koperasi
4	1. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Jani, ST/Fasilitator Kewirausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Usaha Mikro
5	1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
6	1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Budi Aprianto, ST/Fungsional Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Perdagangan
7	1. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Milwan Riswandi, S.Hut/Fungsional	Kelompok Kerja Bidang Perindustrian

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	
8	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
9	1. Kaharudin, SE/Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

BUPATI SAMBAS,



SATONO